

**POLITIK DISTRIBUTIF BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DI AKAR RUMPUT  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021**

**( Studi kasus di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang)**

**Skripsi**

**Program Sarjana (S-1)**

**Jurusan Ilmu Politik**



**OLEH:**

**SALSANA DESYCA DINI SAFITRI**

**1806016030**

**JURUSAN ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UIN WALISONGO SEMARANG**

**2022**

## NOTA PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa Skripsi saudara/i:

Nama : Salsana Desyca Dini Safitri

NIM : 1806016030

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Politik Distributif Bantuan Sosial Sembako Di Akar Rumpu Pada Masa Pandemi Covid-19

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikiran, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 28 November 2022

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi,

Metodologi dan Tata Tulis



Muhammad Mahsun, M.A

NIP.

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**POLITIK DISTRIBUTIF BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DI AKAR RUMPUT  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021**

**( Studi kasus di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang)**

Disusun Oleh :

**Salsana Desyca Dini Safitri**

1806016030

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi

Pada tanggal 20 Desember 2022 dan dinyatakan lulus

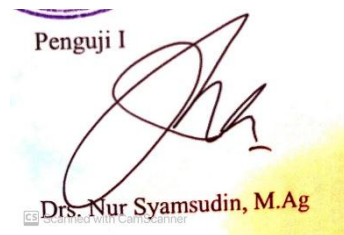
Susunan Dewan Penguji

Ketua



Drs. Nur Syamsudin, M.Ag

Penguji I



Drs. Nur Syamsudin, M.Ag

Sekretaris

A signature in black ink is written over a white background.

Muhammad Mahsun, M.A

Penguji II

A signature in black ink is written over a white background.

Masrohatun, M.Si

Pembimbing

A signature in black ink is written over a white background.

Muhammad Mahsun, M.A

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 28 November 2022



Salsana Desyca Dini Safitri

1806016030

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji Syukur Kehadirat Allah Swt yang telah Memberikan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **POLITIK DISTRIBUTIF BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DI AKAR RUMPUT PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021 (STUDI KASUS DI KELURAHAN MANGUNHARJO, KECAMATAN TUGU, KOTA SEMARANG)**. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada pimpinan umat islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, memiliki pengetahuan dan intelektual.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik S1 (S.Sos) pada Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada Kesempatan ini, Penulis mengucapkan Rasa Syukur atas Rahmat dan Karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun material baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor Universitas Negeri Walisongo (UIN) Semarang dan segenap Pimpinan di UIN Walisongo Semarang
2. Dr. Hj Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
3. Nur Syamsudin, M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
4. Muhamad Mahsun, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan Bimbingan pada penyusunan Skripsi ini
5. Segenap Dosen yang telah mendidik dan memberikan Ilmu kepada penulis
6. Segenap Civitas Akademik yang telah membantu secara Administratif
7. Sugiharti Selaku Kepala Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang
8. Muhamad Amir Selaku Sekretaris Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang

9. Syafa'ati Selaku Staf Kesos Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang
10. Segenap informan yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat ditulis satu persatu
11. Bapak Sulasun dan Ibu Sutarti selaku orang tua penulis serta untuk adik saya adik saya Danelia Helsana Putri yang senantiasa meberikan dukungan dan do'a, semangat dan motivasi dan kasih sayang serta segalanya bagi penulis yang selalu diharapkan ridhonya sehingga penulis mampu berjuang kembali setelah menyelesaikan skripsi ini
12. Segenap Anggota Grup Ra Tenang yaitu Fia Ilani, Anisa Tri Handayani, Efa Silfiayana, Talia Putri, Winda Anggraeni, Reinastiya Kireyvin yang senantiasa memberikan dukungan do'a dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis ini untuk tetap berusaha dan semangat selama masa perkuliahan dan disaat penyusunan skripsi ini
13. Segenap Teman-teman Angkatan 2018 yaitu Johan Taufiqur Rahman, Fahim Masruh, Fahmi Syafiuddin, Asaniyatun Nisa Ibad, Wulan Prasetyaningrum, Vika Riyati, Lailatun Ni'am, Nidhomul Amri, Rizki Yahya, yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis
14. Kakak-kakak tersayang saya keluarga besar PT. SPJT Elok Varida Husnawati, Anisa Restanti, Adriana Fitri, Enes Suganda, Alifia Intan yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
15. Teman-teman keluarga besar Asem-Asem Koh Liem Zaenal Arifin, Adinda, Della Rosita, dan Aldo yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan memberikan semangat kepada penulis
16. Kepada Mas Ismail Andrianto yang sudah bersedia menyemangati dan menghadapi saya dengan sabar sampai terselesaikannya skripsi ini
17. Mahasiswa Ilmu Politik Angkatan 2018
18. Segenap teman-teman Organisasi PMII Rayon FISIP UIN WS
19. Segenap teman-teman Organisasi DEMA FISIP UIN WS
20. Segenap keluarga dan pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Demikian ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa, Semoga Allah SWT Membalas dengan kebaikan yang lebih melimpah. Semoga peneliti ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 28 November 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salsana', with a stylized flourish underneath.

Salsana Desyca Dini Safitri

1806016030

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terselesainya skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Sulasun dan Ibu Sutarti yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis
2. Danelia Helsana Putri selaku adik saya yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis



## **DAFTAR TABEL**

Tabel.1 Susunan Organisasi Rukun Warga (RW) 05 Kelurahan Mangunharjo Semarang.....	22
Tabel 2. Data Kependudukan Tanggulsari Ru05kun Warga (RW) .....	23
Tabel 3. Usia Produktif .....	26

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Konsep Politik Distributif .....	14
Gambar 2. Peta Kelurahan Mangunharjo diantara 7 Kelurahan se-Kecamatan Tugu .....	21
Gambar 3. Peta Kecamatan Tugu (Nomor 16) diantara 16 Kecamatan se-Kota Semarang.....	22

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Wawancara dengan Staf Kelurahan Mangunharjo .....	55
Lampiran 2. Wawancara dengan warga RW 05 Tanggulsari Semarang .....	56
Lampiran 3. Dokumentasi Distribusi Bantuan Sosial Sembako tahun 2021 .....	57
Lampiran 4. Data Penerima Bantuan Sosial Sembako Tanggulsari Kelurahan Mangunharjo .....	58
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian.....	61
Lampiran 6. Daftar Pertanyaan Wawancara .....	62

## **MOTTO**

“Hidup adalah pahatan yang kamu buat saat kamu membuat kesalahan dan belajar darinya”

(RM of BTS)

# **POLITIK DISTRIBUTIF BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DI AKAR RUMPUT PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021**

**( Studi kasus di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang)**

## **Abstrak**

Program Bantuan Sosial Sembako merupakan program sosial yang dilaksanakan Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka menggairahkan bidang sosial di masa Covid-19 saat ini. Berdasarkan Data Jaminan Sosial Program Terpadu Kesejahteraan Sosial akan disosialisasikan kepada masyarakat umum (DTKS). Corona Dies 2019 (COVID-19) yang terjadi di Indonesia banyak diminati oleh berbagai kalangan, terutama masyarakat umum, dan menampilkan berbagai peredam khusus sektor. Pemerintah menggelontorkan berbagai skema bantuan yaitu Program Bantuan Sosial, salah satunya adalah bantuan sosial berupa sembako, sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat didalam mengantisipasi semua permasalahan dengan efektivitas pelaksanaan program, dapat ditentukan indikator kinerja utama program. Efektivitas tersebut dinilai dengan melihat bagaimana proses dan pola distribusi yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan prosedur. Selain itu, dalam proses-proses tersebut terdapat beberapa penyimpangan terhadap distribusi bantuan sosial yang mengakibatkan adanya kesenjangan hingga terjadi konflik baik antar sesama masyarakat maupun masyarakat dengan perangkat kelurahan setempat yang diakibatkan oleh beberapa oknum pada level akar rumput. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kebijakan distribusi bantuan sosial sembako dilakukan pada wilayah Tanggulsari Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang sehingga dari pola distribusi tersebut dapat diketahui siapa aktor akar rumput yang mempengaruhi dan berkepentingan sehingga menentukan sistem distribusi bantuan sosial sembako covid-19. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Sosial Sembako Kementerian Sosial RI pada masa Covid-19 di RW.005 Kelurahan Mangunharjo kurang berhasil terutama pada saat pendataan awal. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidakefektifan ini, antara lain data yang dikumpulkan untuk penerima bantuan tidak valid, tidak ada pengambilan susulan, dan distribusi sembako yang salah sasaran.

**Kata Kunci : Politik Distributif, Bantuan Sosial Sembako, Covid-19**

## **DISTRIBUTIVE POLITICS SOCIAL ASSISTANCE GRASSROOTS AT THE GRASSROOTS OF THE COVID-19 PANDEMIC IN 2021**

(Case study in Mangunharjo Village, Tugu District, Semarang City)

### **Abstract**

The Basic Food Social Assistance Program is a social program as a form of government intervention through the Indonesian Ministry of Social Affairs in order to provide a stimulus for the Social Safety Network in the midst of the Covid-19 period. The Social Assistance Program will be provided to the community based on the Integrated Social Welfare Data (DTKS). The emergence of the 2019 Corona Disease (COVID-19) in Indonesia has raised concerns from various groups, especially the community and has had a detrimental impact on various sectors. As a form of state responsibility to the community in anticipating all problems related to Covid-19, the government has poured various aid schemes, namely the Social Assistance Program, one of which is social assistance in the form of basic necessities. To see the indicators of achievement of the social assistance program, it can be measured through the effectiveness of the implementation of the Social Assistance program. The effectiveness can be assessed by looking at how the process and distribution pattern carried out are in accordance with the procedure. In addition, in these processes there were several deviations in the distribution of social assistance which resulted in gaps resulting in conflicts both between fellow communities and the community with local family officials caused by several elements at the grassroots level. The purpose of this study was to determine the pattern of distribution of basic food social assistance carried out in the Tanggulsari area, Mangunharjo Village, Semarang City so that from the distribution pattern it can be seen who the grassroots actors are influencing the distribution system of social assistance for the COVID-19 basic necessities. The method used in this research is a field research type research method that uses qualitative research methods. There were eight informants in this study. The results of this study indicate that the implementation of the Social Assistance program for the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia during the Covid-19 period in RW.005, Mangunharjo Village, has not been effective, especially during the initial data collection to determine the recipients of assistance and there is an inhibiting factor in this study, namely the data on the recipients of assistance submitted is not in accordance with the number of basic necessities received, there was no data validation, follow-up taking, and food that was issued suddenly and there was no socialization, and there were grassroots actors, namely the head of the Neighborhood Association (RT) who had a big influence on decision making in determining prospective recipients of social assistance.

Keywords: Distributive Politics, Basic Food Social Assistance Program, Covid-19

## DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
MOTTO .....	xii
Abstrak .....	xiii
Abstract .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	12
BAB II KERANGKA TEORI.....	13
A. Teori Politik Distributif.....	13
BAB III LANDSKAP TANGGULSARI MANGUNHARJO.....	20
A. Kondisi Geografis Tanggulsari .....	20
B. Kondisi Demografis Tanggulsari .....	23
C. Kondisi Sosial Ekonomi .....	24
D. Kondisi Pendidikan .....	26

E. Kondisi Politik.....	27
<b>BAB IV POLA DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL SEMBAKO PANDEMI COVID-19 DI TANGGULSARI .....</b>	<b>30</b>
A. Bantuan Sosial Covid-19 : Gambaran Umum Program Sembako .....	30
B. Pola Distribusi Bantuan Sosial di RW 005 Kelurahan Mangunharjo .....	31
C. Dampak Bantuan Sembako di Tanggulsari Mangunharjo.....	35
D. Problem Bantuan Sosial COVID-19 Di Tanggulsari Kelurahan Mangunharjo	37
<b>BAB V AKTOR DAN KEPENTINGANNYA DALAM MENENTUKAN POLA DISTRIBUSI BANSOS SEMBAKO DI TANGGULSARI.....</b>	<b>41</b>
A. Peran RT/ RW/ Yang Menyalurkan Bantuan Sosial .....	41
B. Seberapa Penting Peranan RT/RW Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Covid-19.....	42
C. Faktor Yang Melatar Belakang Praktik Politik Distributif Bantuan Sosial Sembako Covid-19.....	44
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>52</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>65</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada tahun 2020, pandemi covid-19 mulai menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Pandemi ini membawa dampak pada kehidupan manusia dari segi sosial, ekonomi dan politik. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi covid-19 ini sangat terasa bagi seluruh warga masyarakat di Indonesia, khususnya sektor ekonomi, baik pada skala besar maupun kecil, semuanya terkena imbas dari bencana non alam ini, termasuk pada tingkat kelurahan, tidak terkecuali di wilayah Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang. Meningkatnya angka pengangguran karena banyak para buruh yang di PHK karena perusahaan atau UMKM tempat mereka bekerja bangkrut merupakan salah satu contoh yang dirasakan masyarakat Indonesia. Di kota Semarang, Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, sehingga berbagai persoalan akhirnya muncul. Menurut data diskopumkm Semarang, jumlah UMKM di wilayah Kota Semarang adalah sebanyak 17.594 yang tersebar di 16 kecamatan yang juga terkena imbas. Berdasarkan pemetaan dampak Covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, sekitar 56,66% mengalami permasalahan terkait dengan pemasaran, lalu sekitar 25,28% mengalami permasalahan pembiayaan, dan sekitar 12,12% mengalami masalah lain, dan 0,94% kesulitan produksi (Admin, 2022b). Selain itu, dampak pandemi juga berpengaruh. Memang banyak bisnis yang baru berdiri, baik startup digital maupun jenis bisnis lainnya, mengalami perubahan yang terjadi di masa pandemi (Yunus dan Rezki, 2020).

Pada tingkat nasional, dampak perekonomian yang ditimbulkan dari adanya pandemi covid-19 sebagaimana yang dijelaskan dalam Jurnal *Benefita* 5(2), dapat sentimen negatif investor tentang pasar adalah penyebab penurunan pasar baru-baru ini. Disebutkan pula dalam Jurnal *Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan, dan IPTEK* 17(1) bahwa gejala menyebabkan perekonomian terpuruk. Situasi ini diperparah dengan adanya keresahan sosial dan karantina wilayah, yang menyebabkan aktivitas ekonomi memburuk. Pandemi yang berlangsung sejak April 2020 membuat perekonomian di tahun itu anjlok. Hal ini dibuktikan dengan ramalan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020 yang menunjukkan penurunan sebesar -2,07% dari tahun sebelumnya sebesar 5,02% (Aeni, 2021).

Dalam rangka membantu masyarakat menghadapi krisis ekonomi akibat dampak dari wabah covid-19, banyak anggaran negara yang dialokasikan untuk program bantuan pemerintah bagi masyarakat luas yang terdampak pandemi, dengan adanya hal itu pemerintah mengeluarkan semacam skema bantuan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Pemerintah telah membuat program inovatif untuk mengatasi masalah mendesak yang dihadapi rakyat, seperti mengadopsi sistem jejaring sosial baru

yang mencakup subsidi keuangan dan internet, PKH ( Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako, Program Bantuan Beras Bulog, hingga BST (Bantuan Sosial Tunai) yang mana bantuan-bantuan tersebut bertujuan untuk menunjang kehidupan masyarakat Indonesia selama masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak covid-19 secara langsung seperti terpapar covid-19, terkena PHK, dan pekerja yang dirumahkan (Aco, 2021).

Pemerintah Kota Semarang yang juga menghadapi pandemi ini, turut membuat kebijakan untuk menekan penyebaran dari pandemi contohnya dengan dibentuknya surat pernyataan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Masyarakat Selama Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Semarang yang mana dalam aturan ini kegiatan masyarakat seperti kegiatan keagamaan, sosial budaya, belajar mengajar akan dihentikan sementara (Admin, 2022a). Selain membuat kebijakan tentang pembatasan kegiatan, pemerintah Kota Semarang juga menetapkan kebijakan lain yaitu dengan membuat kebijakan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Melalui Kartu Semarang Hebat yang mana dalam kebijakan ini berisi tentang aturan, bentuk bantuan, kriteria penerima bantuan, mekanisme dan lainnya. Bantuan sosial tak hanya berhenti disitu saja, pemerintah kota juga menyalurkan bantuan sosial berupa kartu pra-kerja, BLT (Bantuan Langsung Tunai) termasuk bantuan berupa sembako (Admin, 2022a). Tujuan dari pemerintah membentuk program bantuan selama covid-19 yaitu sebagai penanda terlaksananya maksud awal rencana bantuan sosial yaitu meringankan beban warga yang ekonominya terganggu pada saat pandemi corona (covid-19).

Namun pada faktanya distribusi program pemerintah yang bertujuan untuk membantu warga masyarakat tersebut terjadi beberapa persoalan misalnya seperti data penerima bantuan yang kurang valid dan distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Terkait dengan persoalan-persoalan diatas terdapat studi dari sarjana-sarjana lain yang mengkaji tentang persoalan ini, contohnya adalah studi yang dilakukan oleh Fathimah dan Nulhaqim (2020) yang mengkaji tentang konflik yang terjadi akibat pendistribusian bantuan sosial covid-19 serta penyelesaiannya di Kota Bandung. Hasilnya, bahwa konflik yang terjadi diakibatkan karena adanya banyak ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial yang salah sasaran, selain itu terdapat data yang tidak valid yang mendapat bantuan sosial juga. Penyelesaian yang dilakukan dalam penelitian ini dianalisa dengan memakai metode pohon konflik yang menggali masalah dari akar, lalu mempertemukan pihak yang bersangkutan, mediasi, diskusi, dan usaha meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah. Lalu studi yang dilakukan oleh Nurhayati, dkk (2021) yang mengkaji tentang polemik yang ditimbulkan dari proses implementasi jaminan sosial atau bantuan sosial, yaitu disebabkan oleh alur birokrasi penyaluran bantuan sosial diduga menjadi penyebab dari munculnya kekisruhan ini. Misalnya, banyak warga yang tidak mengetahui tentang pencairan dana bantuan sosial sehingga tidak tahu apa yang harus dipersiapkan karena alur pencairan dana sosial yang belum tersosialisasikan dengan baik. Kemudian, proses pendataan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran serta jangka waktu untuk melakukan

penyaluran bantuan sosial yang tidak serentak. Selain itu, terdapat golongan rakyat miskin yang tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial, menandakan bahwa proses distribusi atau penyaluran program bantuan sosial tidak mudah. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya persiapan dari pemerintah itu sendiri dalam proses pendistribusiannya, misalnya ketidaktepatan data bagi golongan yang seharusnya menerima bantuan sosial. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu, adanya oknum yang melakukan korupsi dana bantuan sosial, serta oknum yang melakukan pungutan liar terhadap warga untuk menambahi uang jika akan mengambil bantuan sosial sembako.

Beberapa contoh kajian tersebut, sebagian besar hanya membahas penyebab persoalan umum bantuan sosial yang terjadi pada tingkat desa dan kota namun belum banyak melihat tentang bagaimana proses distribusi tersebut dilakukan terutama proses distribusi sembako. Belum banyak melihat sejauh mana pola-pola distribusi sembako tersebut dan siapa saja aktor-aktor yang memiliki kepentingan yang terlibat langsung pada proses pendistribusian sembako. Praktik politik distributif merupakan bukan hal yang baru di masyarakat Indonesia, sebagai contoh adalah studi yang dilakukan oleh Sumarto (2014) yang mengkaji tentang program bantuan langsung tunai oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai bahwa program tersebut memiliki tujuan untuk memobilisasi pemilih pada pemilu tahun 2009. Politik distributif banyak diwarnai dengan klientelisme, sebagian besar praktik klientelisme banyak terjadi pada momen pemilihan umum, yang mana mekanismenya menggunakan pembelian suara menggunakan uang atau barang bahkan menggunakan program bantuan sosial (Stokes, 2007 dalam Sumarto, 2014). Untuk itu, penulis ingin melakukan kajian secara mendalam proses distribusi bantuan sosial terutama bantuan berupa sembako yang terjadi di akar rumput yaitu level RW di Kelurahan Mangunharjo Semarang.

Kajian politik distributif di Mangunharjo khususnya pada komunitas nelayan akan difokuskan pada pola distribusi bantuan sosial sembako di komunitas nelayan Tanggulsari. Sejauh mana bantuan sosial sembako tersebut di distribusikan secara demokratis atau non demokratis serta pendataan yang valid. Salah satu program bantuan sosial yang dikeluhkan oleh banyak masyarakat adalah bantuan sosial berupa sembako, termasuk pada komunitas nelayan di wilayah Tanggulsari Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang yang mengalami hal serupa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Komunitas nelayan di wilayah Tanggulsari Semarang menarik untuk dikaji serta menjadi alasan penelitian karena masyarakat nelayan di Tanggulsari masih banyak yang tergolong dalam masyarakat miskin yang berpendidikan rendah. Selain itu, beberapa masyarakat nelayan di Tanggulsari yang berprofesi sebagai buruh juga tak sedikit yang terparap covid-19 saat itu sehingga harus dirumahkan bahkan sampai menjadi pengangguran. Berdasarkan observasi dan wawancara singkat pada perangkat Kelurahan Mangunharjo menjelaskan bahwa komunitas nelayan Tanggulsari di Kelurahan Mangunharjo memiliki jumlah KK (Kartu Keluarga) sebanyak 197 KK yang berada di RW 05 yang terbagi menjadi 3 RT. RT 01 berjumlah 55 KK, RT 02 berjumlah 77 KK, dan RT 03 berjumlah 65 KK. Bantuan sosial sembako yang diterima di komunitas nelayan ini sebanyak 37 paket sembako, jumlah bantuan sosial ini tentunya dibagikan secara tidak merata karena dibatasi (observasi, 11 April 2022). Jadi, hanya

beberapa warga-warga tertentu menurut pilihan ketua RT yang menerima bantuan sembako tersebut karena dirasa Ketua RT lebih mengetahui kondisi warganya. Dikarenakan keadaan yang menyulitkan tersebut, maka rentan akan terjadinya gejolak protes apalagi perihal bantuan sosial termasuk bantuan sembako yang sering menjadi persoalan karena sekecil apapun bentuknya asal disebut bantuan dari pemerintah, maka akan tetap dipermasalahkan jika tidak merata apalagi penerimanya tidak sesuai dengan kriteria. Selain itu, penulis juga akan mengkaji siapa aktor yang terlibat dalam distribusi tersebut dan kepentingan apa yang mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan saat pendataan dan pendistribusian bantuan sosial sembako di salah satu RW Kelurahan Mangunharjo Semarang.

Studi ini penting dilakukan untuk mengetahui bahwa proses distribusi tidak hanya menjadi domain ekonomi maupun sosial, tetapi sebenarnya proses distribusi tidak lepas dari pengaruh politik. Karena itu, penting untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan bahwa politik dapat hadir dalam setiap level masyarakat termasuk pada level akar rumput apalagi perihal program bantuan sosial ekonomi sembako sebagai dampak yang diakibatkan oleh covid-19. Selain itu, kajian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah aktor di akar rumput terkait ( Ketua RT dan perangkatnya) memiliki kepentingan pribadi dalam proses distribusi bantuan sosial sembako.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pola distribusi bantuan sosial sembako pada tingkat RT dilakukan di komunitas nelayan Kelurahan Mangunharjo?
2. Siapa aktor dan kepentingan apa yang paling banyak berpengaruh menentukan pola distribusi bantuan sosial pada komunitas nelayan di Kelurahan Mangunharjo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pola distribusi bantuan sosial Covid-19 tingkat RT pada komunitas nelayan Kelurahan Mangunharjo Semarang.
2. Untuk mengetahui siapa saja aktor yang paling berpengaruh dalam menentukan pola distribusi bantuan sosial pada komunitas nelayan di Kelurahan Mangunharjo Semarang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan bahwa temuan studi ini akan bermanfaat bagi semua organisasi yang membacanya atau terlibat dengannya secara menyeluruh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, seperti yang akan dibahas di bawah ini:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan khususnya yang berkaitan langsung dengan distribusi bantuan sosial covid-19 tingkat RT pada Kelurahan Mangunharjo Semarang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran terutama untuk warga Tanggulsari, mengenai pola distribusi bantuan sosial covid-19 yang selama ini mereka terima.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi peneliti lainnya untuk memahami dan mengetahui tentang pola distribusi bantuan sosial covid-19 serta dengan politik distributif dibalikinya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang pola distribusi bantuan sosial covid-19 dan politik distributif yang terjadi di Tanggulsari Kelurahan Mangunharjo.
- b. Manfaat bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain dan menjadi referensi suplemen, referensi dan perbandingan bagi peneliti lain.
- c. Manfaat bagi masyarakat, diharapkan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk warga Tanggulsari Kelurahan Mangunharjo mengenai distribusi bantuan sosial covid-19 yang selama ini mereka terima.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Studi atau penelitian tentang politik distributif bantuan sosial covid-19 ini bukan merupakan hal yang baru, studi ini sudah banyak dikaji oleh beberapa sarjana yang serupa kasusnya dengan yang penulis lakukan. Terdapat dua kelompok studi yang membahas perihal bantuan sosial atau jaminan sosial, kelompok studi yang pertama adalah studi yang membahas tentang penyimpangan dan permasalahan apa saja yang terjadi pada saat pendistribusian bantuan sosial, Contohnya adalah studi yang dilakukan oleh Fathimah dan Nulhaqim (2020) yang mengkaji tentang analisa konflik penyimpangan bantuan sosial covid-19 dan penyelesaiannya dengan mengambil lokasi penelitian di kota Bandung. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penyebab atau faktor dari adanya konflik yang terjadi disebabkan oleh adanya distribusi bantuan sosial covid-19 yang salah sasaran. Mereka yang ditargetkan harus mendapat bantuan sosial atau disebut dengan Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) karena keadaan ekonominya yang berubah karena dampak covid-19 malah tidak mendapat bantuan sosial. Penelitian ini menjelaskan bahwa validasi data adalah penyebab utama dalam konflik yang terjadi di Kota Bandung dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Menurut Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis), Kota Bandung memiliki sekitar 238.000 jiwa yang terdampak pandemi ekonomi Covid-19 dan telah menerima bantuan sosial dari pemerintah. Namun, berdasarkan temuan di lapangan yang dilakukan

oleh penelitian ini menunjukkan bahwa masih Ada banyak poin data yang tidak memenuhi kriteria, dan ada beberapa orang yang merasa disalahpahami ketika menerima tunjangan sosial. Masalah lain juga muncul dari data yang tidak diperbarui karena warga yang terdaftar sebelumnya sudah meninggal atau pindah alamat. Berdasarkan permasalahan yang dikaji diatas, penyelesaian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisa pohon konflik yang mengkaji masalah dari akar hingga ujungnya. Adapun analisa penyelesaian apa yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda. seperti mediasi, musyawarah mufakat, pembaruan data serta saran perhatian penuh oleh pemerintah pada masyarakat.

Studi yang dilakukan oleh Nurhayati, dkk (2021) yang mengkaji tentang penyimpangan pendistribusian bantuan sosial covid-19 perspektif analisis yuridis konsep negara kesejahteraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami persepsi kedaulatan negara dan hukum kontrak sosial dalam konteks pandemi Covid-19 di Indonesia. Hasilnya penelitian ini menjelaskan bahwa memang pemerintah berusaha menanggulangi permasalahan pandemi dengan menjalankan kewajibannya Penggunaan beberapa cara, seperti pembayaran uang sembako dan tersedianya vaksinasi gratis untuk seluruh rakyat Indonesia, merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebenarnya pelaksanaan eksperimen sosial atau kontrak sosial ini telah menimbulkan beberapa kontroversi. Hal ini disebabkan sanksi sosial yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat dan alur birokrasi penyaluran bantuan sosial ini menimbulkan kekisruhan. Misalnya, belum tersosialisasikannya alur pencairan bantuan sosial sehingga banyak warga tidak mengetahui apa yang harus dipersiapkan. Kemudian, proses pendataan bantuan sosial kurang konsistensi dan waktu yang cukup untuk melaksanakan penulisan kontrak sosial yang tidak efektif. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan data pada Banyak orang yang canggung secara sosial karena penerima bantuan sosial tidak tercatat yang akhirnya tidak mendapat bantuan sosial tersebut. Lalu permasalahan yang terjadi pada pemberian bantuan sosial, banyak warga yang mengadu bahwa bantuan sosial berupa sembako yang mereka terima sudah tidak layak konsumsi contohnya adalah beras. Faktor selanjutnya yang menyebabkan tidak dapat dipertanggungjawabkannya data keuangan bansos secara baik dalam penelitian ini adalah adanya oknum yang melakukan kecurangan keuangan sosial. Nomor tersebut diduga menerima uang dari beberapa vendor layanan sosial di Covid-19. Uang tersebut diperoleh dari beberapa perantara, dan pedagang Covid-19 memberikan uang dengan jumlah yang tidak sedikit dan tidak terlalu tinggi. Hal-hal diatas menjadi sangat serius karena dalam keadaan yang serba sulit saat itu masih terdapat oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan terlebih mereka memanfaatkan keadaan kepada masyarakat miskin.

Studi oleh Basir (2008) yang mengkaji tentang Dana Pengelolaan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Penyimpangan Keuangan Daerah. Hasil: Penyimpangan dalam penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) dalam lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 kemudian terjadi akibat proses penyaluran dana tidak transparan dan tidak dapat disentuh oleh penerimanya. Asas kecermatan dan kehati-hatian tidak dipatuhi dalam melakukan verifikasi terhadap setiap proposal yang diajukan, sehingga banyak proposal fiktif tidak dapat dibuat dan pemerintah tidak menerima perkiraan Rp 8.867.500.000,- dalam mendapatkan kerugian

dari Kantor Perwakilan BPK RI Sulsel. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menekankan perlunya keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, dan anggaran serta perlu dilakukan secara transparan dan mampu dirundingkan (akuntabel).

Studi selanjutnya adalah studi yang dilakukan oleh Wahyuni (2021) yang mengkaji tentang permasalahan penyaluran bantuan sosial pada masa PPKM. Penelitian ini menjelaskan bahwa ketidakrataan data atau validasi data tidak akurat dan hal tersebut sudah menjadi permasalahan yang klasik dalam hal p bantuan sosial enyaluran Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakakuratan data antara lain belum semua Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kementerian Sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Prosedur verifikasi dan validasi data juga cukup melelahkan dan lambat. Isu lain yang muncul dalam esai ini karena bermasalah adalah daya pekerja sosial dalam penyaluran bantuan belum bisa menyesuaikan diri dengan situasi pandemi COVID-19. Serta masalah karena adanya potensi korupsi dalam dana bantuan sosial. Lalu solusi yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pembaruan data mulai dari tingkat yang terendah hingga tertinggi, lalu keterbukaan data yang valid ke ruang publik juga dibutuhkan agar warga masyarakat dapat memantau secara langsung mengenai data yang sudah divalidasi, lalu melakukan verifikasi kelayakan data yang dilakukan secara berkala yang bertujuan untuk memastikan kevalidan data.

Kelompok studi kedua, adalah studi yang membahas dampak, evaluasi program bantuan sosial serta mengukur bagaimana efektivitas dari program jaminan sosial, seperti studi yang dilakukan oleh Avriliyanti (2015) yang mengkaji tentang dampak dari pemberian bansos oleh pemerintah daerah kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Penelitian ini menjelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin diantaranya seperti menjadikan masyarakat tersebut malas dan menjadi pola hidup yang konsumtif, sehingga rentan akan terjadinya konflik antar masyarakat dengan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bahwa dalam hal pendistribusian bantuan sosial masih sangat buruk oleh pola distribusi yang lamban, berbelit-belit, mahal dan melelahkan. Karena risiko birokrat tersebut di atas, situasi ini tidak sejalan dengan keinginan masyarakat luas.

Lalu studi yang dilakukan oleh Putri, Muchsin dan Hayat (2021) yang mengkaji perihal evaluasi penyaluran bantuan pandemi sosial di Desa Kersik Putih untuk COVID-19. Menurut kajian saat ini, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program bansos di Desa Kersik Putih. Permasalahan tersebut antara lain masih banyaknya warga yang mempertanyakan proses peninjauan bansos, transparansi pengajuan dan proses peninjauan bansos, serta tidak jelasnya kriteria proses peninjauan bansos. Kenyataan dilapangan, program bantuan sosial hanya dibuat sebagai program dadakan untuk mengejar target dan meredam gejolak sosial ada pandemi Covid-19 ini. Ini adalah cerminan dari waktu yang tersedia untuk memverifikasi data lain-lain dari rumah keluarga. Misalnya, mengoordinasikan proyek untuk mentransfer data dari rumah orang miskin ke lembaga pemerintah lain yang bekerja untuk prakarsa keadilan sosial, serta mengatur penyediaan akses ke informasi tersebut. Adanya isu tersebut pada akhirnya mencuat ke masyarakat, yakni adanya masalah pendataan yang berakibat pada sasaran yang tidak tepat dan

ketidakpuasan masyarakat atas pendistribusian program bantuan sosial di Kabupaten Tanah Bumbu.

Selanjutnya studi oleh Shofi (2021) yang memiliki tujuan memahami seberapa efektif implementasi program Bantuan Sosial Tunai Kemensos, dengan menggunakan empat indikator dari teori Budiani: sasaran sasaran, sosialisasi program, sasaran program, dan capaian program, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana program BST Kementerian Sosial RI dilaksanakan pada tahun Covid-19 dengan mengambil lokasi penelitian di RW 01 Kelurahan Duri Kosambi. Pada penelitian ini diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat penyaluran BST (Bantuan Sosial Tunai) di Kelurahan Duri Kosambi adalah adanya data yang tidak valid sehingga masih banyak data lama yang terdaftar yang masih mendapat bantuan sosial namun yang bersangkutan sudah lama pindah atau meninggal dunia. Faktor selanjutnya adalah adanya keterlambatan dalam pengambilan dana bantuan sosial dikarenakan yang bersangkutan ada kendala pada saat jadwal pengambilan bansos seperti sakit atau sedang bekerja. Lalu Banyak anggota masyarakat yang abai dan tidak sadar akan adanya bantuan sosial BST karena kurangnya sosialisasi dari aparat kelurahan serta pemberitahuan yang mendadak yang pada akhirnya memicu konflik antara warga masyarakat dengan pihak kelurahan.

Studi-studi diatas lebih banyak memfokuskan persoalan atau permasalahan yang terjadi antara warga masyarakat dengan instansi-instansi pemerintah daerah, serta studi-studi diatas juga lebih banyak memfokuskan pada penyebab atau faktor yang menjadi penghambat dalam penyaluran bantuan sosial covid-19 tahun 2020-2021. Penelitian diatas belum banyak yang membahas mengenai politik distribusi yang terjadi pada momen bantuan sosial covid-19 terutama pada tingkat akar rumput atau tingkat yang paling rendah yaitu RT (Rukun Tetangga). Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai politik distribusi yang terjadi di komunitas nelayan wilayah Tanggulsari Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang serta akan mengkaji lebih dalam peran siapa dan kepentingan apa yang menentukan pola distribusi bantuan sosial covid-19 dalam penelitian ini adalah bantuan sosial berupa sembako yang terjadi di Tanggulsari Kelurahan Mangunharjo.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian tentang politik distributif ini adalah jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2016) Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mempelajari dan memahami pentingnya masalah sosial pada berbagai orang. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, konsep dan fenomena, dan isu-isu sosial. Salah satu alasan menggunakan metode kualitatif adalah pengalaman peneliti. Dengan cara ini data yang ditemukan akan lebih memahami apa yang ada di balik fenomena yang mungkin sulit untuk dipahami. Sedangkan, jenis pendekatan yang digunakan peneliti dalam studi ini adalah studi kasus, yang menyelidiki kasus secara rinci dan menggunakan berbagai metode pengumpulan data berdasarkan jangka waktu tertentu untuk mengumpulkan informasi yang lengkap (Creswell, 2015). Studi tentang politik distributif yang dilakukan penulis nantinya



melibatkan masyarakat, Ketua RT, perangkat Kelurahan Mangunharjo dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan distribusi bantuan sosial sembako covid-19 pada level akar rumput, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa distribusi bantuan sosial termasuk sembako rentan terjadi politisasi oleh pihak atau aktor tertentu yang memiliki kepentingan didalamnya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kerabat-kerabat aktor tersebut. Dengan melakukan interview langsung maka penulis dapat menangkap persepsi masing-masing tentang pendistribusian bantuan sosial tersebut yang mana setelah informasi yang didapat akan diceritakan kembali oleh peneliti dalam bentuk kronologi naratif.

## 2. Sumber dan Jenis Data

### a) Data iPrimeri

Berisi informasi dari sumber utama atau terus diberikan kepada yang menginginkannya, serta dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti (Sugiyono, 2018). Data untuk analisis pendahuluan studi ini dikumpulkan secara terus-menerus dari lanskap menggunakan observasi terkait informasi berkelanjutan dan wawancara mendalam. Penulis perlahan bergerak menuju lokasi survey di kecamatan Kelurahan Mangunharjo dan mengumpulkan data berupa wawancara dan rencana yang akan segera menggunakan data tersebut.

### b) Datai Sekunderi

Data sekunder adalah istilah bagi seseorang yang tidak memberikan data kepada yang memintanya secara diam-diam, baik karena informasi itu diberikan kepada orang lain atau berasal dari suatu dokumen (Sugiyono, 2018). Data untuk studi paruh kedua akan berasal dari sumber lain yang memiliki pengetahuan tentang distribusi manfaat sosial pada tahun 2019 melalui penelitian ilmiah, penulisan ilmiah, dan penelitian berbasis situs web, serta mereka yang mencari pendukung data yang akurat.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam analisis penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi tersebut akurat dan dapat diandalkan untuk mengidentifikasi masalah penelitian:

### a) Wawancara

Wawancara adalah jenis komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan pencarian informasi dari orang lain sambil mengajukan pertanyaan dalam upaya untuk menyelesaikan suatu masalah (Mulyana, 2010). Informasi diperoleh melalui penggunaan teknik wawancara dari narasumber seperti Lurah dan perangkat Kelurahan Mangunharjo, Ketua RT, serta beberapa komunitas masyarakat nelayan yang ada di wilayah Tanggulsari. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini dimaksudkan untuk membantu orang memahami konsep tertentu, apakah itu datang dari sudut pandang kecurigaan, pendapat, persuasi, atau tentang kejadian tertentu, skenario, fakta, atau kenyataan. Dengan mengajukan pertanyaan, peneliti dapat memperoleh informasi dari dan mewawancarai

beberapa anggota masyarakat Mangunharjo, memastikan bahwa semua data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ditangani dengan baik.

Warga RW.005 Kelurahan Mangunharjo penerima Bantuan Sosial Sembako telah ditunjuk sebagai partisipan kunci atau sumber informasi utama dalam penelitian ini. Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah sekitar 10 orang, meliputi 4 orang anggota perangkat kelurahan, 5 orang anggota komunitas Tanggulsari RW 05, dan ketua RW 05. Menurut seluruh informasi yang diperoleh dan diperoleh melalui observasi dan wawancara, informan utama yang dimaksud adalah warga RW.005 Kelurahan Mangunharjo yang tercatat sebagai penerima Bantuan Sosial Sembako di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). RW.005 Kel yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 merupakan Mangunharjo yang menerima Bantuan Sosial Sembako ini. Akibat pandemi COVID-19, masyarakat RW.005 Kel terkena dampaknya. Mangunharjo mengalami stres dan kesusahan saat berusaha mempertahankan jalan hidupnya.

#### b) Observasi

Observasi adalah upaya mengumpulkan data ketika salah satu peneliti datang secara permanen ke lokasi penelitian dan mengamati aktivitas orang lain di sana. (Creswell, 2015). Pada tahap observasi ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data secara lebih akurat yang kemudian diolah menjadi objek penelitian. Dalam konteks riset ini yang akan diobservasi penulis adalah terkait dengan kehidupan sosial masyarakat komunitas nelayan di wilayah Mangunharjo, bagaimana masyarakat Mangunharjo menghadapi situasi yang berubah selama covid-19, bagaimana upaya masyarakat untuk bertahan dalam situasi kondisi covid, bagaimana komunikasi antar masyarakat, dan perubahan sosial yang terjadi. Dalam masa covid-19 yang terjadi tahun lalu maka memungkinkan terjadinya ketimpangan yang disebabkan oleh distribusi bantuan sosial sembako yang dipengaruhi oleh aktor yang berkepentingan pribadi yang memiliki kekuasaan di tempat tersebut, penulis berusaha mencari fakta bagaimana peran aktor pemegang pola distribusi bantuan sosial tersebut melalui observasi kepada warga masyarakat.

RT 001 adalah induk dari Rukun Warga (RW) 005 Kelurahan Mangunharjo. RT. 003. Ketua RW Ketua RW, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Keamanan, Koordinator Pemuda dan Olahraga, Koordinator Kebersihan, Koordinator Humas, Koordinator Kegamaan, dan Koordinator Publikasi dan Penyusunan Dokumen.

Pengurus RW merupakan salah satu warga yang sudah beberapa lama bermukim di wilayah Rw.005 Kelurahan Mangunharjo. Ketua RW Setiap warga RW wilaya memiliki pilihan untuk menyerahkan formulir secara informal atau formal (dengan coblosan) dengan usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Masa bakti pengurus adalah selama tiga tahun. Tugas Ketua RW 005 Kelurahan Mangunharjo adalah membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan.

#### c) Dokumentasi

Pada teknik dokumentasi ini peneliti berusaha mengumpulkan data-data yang telah dibukukan atau dikumpulkan oleh orang lain. Seperti berupa data penerima sembako, dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan bantuan sosial sembako, laporan-laporan perihal distribusi seperti gejala protes yang ditimbulkan dari ketidaktepatan pendistribusian sembako, lalu dapat berupa foto maupun video yang merupakan sebuah bukti gambar bahwa proses pendistribusian bantuan sosial itu terlaksana. Dokumen-dokumen ini penting adanya untuk melengkapi dan memperkuat temuan-temuan penelitian yang telah dikumpulkan melalui mekanisme wawancara mendalam maupun observasi.

#### 4. Analisis Data

Metodologi analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk memudahkan pengguna mengidentifikasi wawasan kunci. Bogdan mendefinisikan analisis data dalam Sugiyono sebagai proses sistematis mencari dan mengatur data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain sehingga mudah dipahami dan dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Analisis kualitatif data dengan fokus pada induktivitas adalah analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles dan Huberman (1992: 16), analisis terdiri dari tiga kegiatan terkait yang terjadi secara bersamaan: redaksi data, pengolahan data, dan analisis kesimpulan. Ringkasan yang lebih komprehensif dari bab ketiga adalah sebagai berikut:

##### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data. Artinya, data dituangkan dari bidang ke dalam formulir laporan, formulir laporan dikurangi, diringkas, dan difokuskan pada apa yang menjadi garis besar. Penulis mencari topik dan aturan yang diabaikan secara sistematis. Data yang dikembangkan memberikan indikasi yang jelas tentang cara bermain game dan memudahkan pengguna untuk mendapatkan data yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhannya (Sugiyono, 2018). Redaksi ini sama dengan membunyikan bel dan mengidentifikasi apa yang benar-benar penting. Data yang dihasilkan memberikan pesan, diverifikasi, dan memudahkan pengguna untuk mengumpulkan data.

##### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Miles dan Huberman mengatakan bahwa teks yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Tahap akhir penyajian data dilakukan untuk mengkonfirmasi gambaran besar atau bagian-bagian tertentu dari penyelidikan dengan membuat deskripsi deskriptif tentang masalah yang diselidiki. Dalam penelitian ini, perlu adanya menyajikan data untuk meringkas penjelasan dengan sederhana dengan bagan serta hubungan antar kategori dengan cara yang mudah dipahami.

##### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan bagian dan proses dari analisis data. (Sugiyono, 2018). Setelah melakukan penelitian, peneliti menarik sebuah

kesimpulan agar pembaca dapat memahami point-point yang disimpulkan pada penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan dalam proses berjalannya penelitian dilapangan sampai penarikan kesimpulan secara umum dalam proses penulisan tersebut.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam penyuntingan draf ini, penulis menyertakan enam bayi yang disusun secara logis sebagai berikut:

Bab I menyajikan daftar masalah yang berkaitan dengan kajian psikologi sebagai sarana untuk mengelaborasi mata kuliah psikologi, antara lain: Latar Belakang, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Mengurai Teori, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II mengeksplorasi kerangka teori lebih detail dan komprehensif sebagai acuan untuk melakukan penelitian ini, yaitu penggunaan teori politik distributif. Politik distributif diartikan sebagai suatu strategi politik yang dilakukan dengan melibatkan keberadaan warga dalam proses pengalokasian dan pendistribusian sumberdaya.

Bab III berisi pemaparan umum objek penelitian yang meliputi gambaran umum Kelurahan Mangunharjo, letak geografis, kondisi monografis kelurahan, dan penggambaran kehidupan masyarakat Tanggulsari Kelurahan Mangunharjo. Letak geografis meliputi luas wilayah dan peta wilayah sedangkan kondisi monografis nantinya berisi jumlah penduduk Tanggulsari berdasarkan jenis kelamin, kondisi penduduk berdasarkan umur, kondisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk berdasarkan kependudukan, keadaan ekonomi desa, gambaran sosial dan gambaran budaya warga masyarakat Tanggulsari.

Bab IV mengkaji tentang pola distribusi bantuan sosial covid-19 yang terjadi di level akar rumput (RT) masyarakat Tanggulsari Kelurahan Mangunharjo. Dalam bab ini penulis mencoba menjawab pertanyaan pertama dalam rumusan masalah, yaitu tentang pola distribusi bantuan sosial sembako covid-19 yang diterapkan pada masyarakat Tanggulsari Kota Semarang.

Bab V mengkaji tentang siapa, peran aktor serta kepentingannya dalam pendistribusian bantuan sosial sembako covid-19 di wilayah Tanggulsari yang menjadi pembahasan dalam pertanyaan kedua rumusan masalah penelitian.

Bab VI berisi penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan pola atau sistem pendistribusian bantuan sosial covid-19 dan aktor yang memiliki kepentingan yang berpengaruh dibalik pendistribusian disertai dengan saran penelitian.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

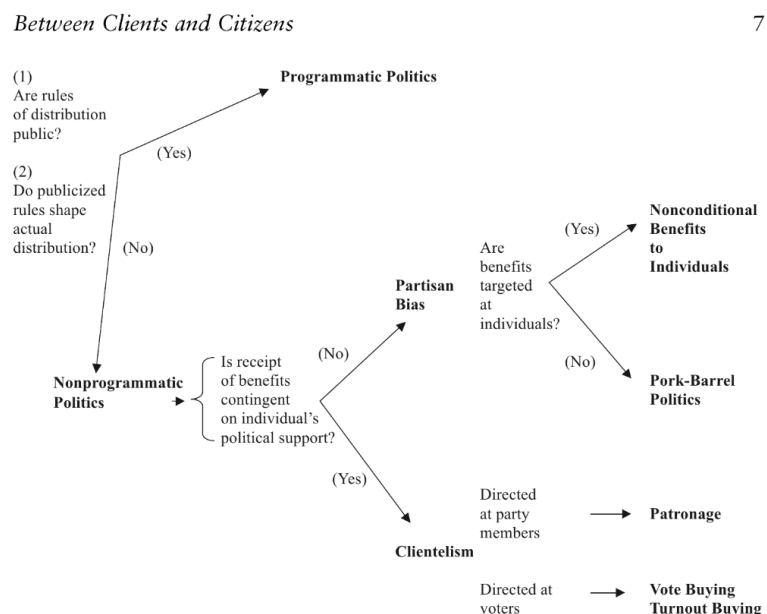
#### **A. Teori Politik Distributif**

Program BLT merupakan salah satu program perlindungan sosial dibawah program penanggulangan kemiskinan yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan rezim kesejahteraan (welfare regime) di Indonesia (Sumarto, 2011 dalam). Secara simultan, program BLT juga mewarnai pergeseran welfare regime di Indonesia dengan berbagai masalah sosial politik yang diakibatkannya. Pemasalahan yang sering terjadi karena distribusi BLT adalah program ini telah menciptakan konflik yang cukup kompleks di masyarakat (Sumarto, 2011). Menurut Stokes (2012, dalam Sumarto 2014) politik distributif diartikan sebagai suatu upaya pendistribusian sumber daya yang bertujuan untuk menarik perhatian konstetuen yang mana dalam proses pendistribusian tersebut memiliki maksud untuk mencari dukungan atau suara saat pemilu. Politik distribusi sendiri tidak dapat dilepaskan dari hubungan yang terjadi antara patron dengan client. Hubungan yang dinamakan patronase ini kerap dinilai menjadi faktor penghambat bagi pemenuhan unsur demokratis dalam pemilu. Hal itu dikarenakan karena pola hubungan patronase berdasarkan pada posisi yang tidak seimbang antara patron dengan client sehingga bertentangan dengan demokrasi yang menjunjung kesetaraan dan kebebasan dalam pemilu. Di sisi lain, hubungan patron dengan client tidak melulu memiliki dampak negatif dalam masyarakat, hubungan seperti ini juga dapat berimplikasi positif bagi efektivitas upaya-upaya pemenangan pemilu. Hal itu dikarenakan hubungan patron-client memuat unsur loyalitas yang berpengaruh di dalamnya. Oleh sebab itu, tidak jarang tokoh masyarakat yang menjadi patron kemudian pilihan politiknya dapat mempengaruhi masyarakat pengikutnya sebagai client yang loyal (Sjafrina, 2012).

Politik distributif dapat dipahami bahwa politik merupakan arena alokasi dan pendistribusian sumber daya. Sumber daya merupakan segala sesuatu yang dapat memperdayakan warga dari seorang politisi kepada warga atau masyarakat. Sumber daya ini dapat berupa materiil maupun sosial. Politisi yang baik adalah politisi yang mampu menerapkan politik distributif secara ideal. Artinya, dalam berpolitik mereka mampu mengelola sumber daya yang telah diaspirasikan, dialokasikan secara formal, dan disebar kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Contoh dari politik distributif ini adalah bagaimana masyarakat dapat mengumpulkan dan kemudian merumuskan aspirasi mereka,

tahap ini dilakukan sebelum pemilu. Pemilu yang merupakan tahap lanjutan dalam hal tindak lanjut realisasi daftar aspirasi masyarakat. Setelah itu, pasca pemilu maka politisi yang mendapatkan kursi maka harus menindaklanjuti aspirasi yang telah dirumuskan oleh rakyatnya. Hal ini bisa berupa sebuah kebijakan, maupun program-program pemerintah. Semuanya menggunakan anggaran Negara dan pendistribusiannya untuk seluruh masyarakat, sesuai kebutuhannya. Selain itu, politik distributif dapat diartikan pula pada perspektif yang memberikan pemahaman bahwa politik (melalui lembaga politiknya: eksekutif-legislatif) yang mempunyai peran sebagai wadah bagi politisi untuk melakukan distribusi dan alokasi sumber daya. Sumber daya menurut Wardani adalah segala sesuatu yang dapat memampukan hingga memberdayakan masyarakat dalam hubungan kuasanya dengan pengelolanya, dalam hal ini dapat berupa birokrat maupun politisi yang terpilih menjadi pejabat publik. Sumber daya juga sering dimaknai sebagai hal baik yang bersifat materiil maupun sosial (Wardani 2014). Jadi, pemaknaan distribusi sumber daya yang termanifestasikan dalam bentuk kebijakan publik, tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik para aktor perumusannya. Kerangka teori politik distributif jika merujuk pada buku *Brokers, Voters and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics* karya Susan C. Stokes, konsep politik distributif dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu politik programatik dan non-politik programatik sebagaimana penjelasan dan gambar bagan dibawah ini.

Gambar 1. Konsep Politik Distributif



Sumber : Susan C. Stokes, dkk

### 1. Distribusi Programatik

Dalam menyusun sebuah program pendistribusian sumber daya, maka strategi yang dilakukan harus bersifat terprogram dan demokratis. Terdapat dua hal yang menjadi pilar dalam distribusi programatik. Pertama, kriteria distribusi haruslah bersifat umum. Dalam kasus-kasus tertentu, ketika menyusun sebuah strategi pendistribusian sumber daya sering dijumpai proses implementasinya tidak sesuai dengan regulasi karena hanya melibatkan beberapa kepentingan kelompok atau individu. Jika kriteria umum ini diimplementasikan dalam proses penyusunan program maka akan memunculkan kriteria distribusi yang tersedia untuk ruang publik. Kedua, kriteria formal distribusi harus benar-benar membentuk distribusi sumber daya yang bersangkutan. Oleh karena itu, agar suatu skema menjadi terprogram, kriteria yang menjadi acuan dalam distribusi haruslah:

- a. Formal dan umum, dan
- b. Membentuk distribusi yang bermanfaat atau sumber daya yang sebenarnya

Dalam refleksi konseptualnya, dilakukan pemeriksaan perbedaan yang dibuat oleh para sarjana, tetapi dapat menemukan versi yang tampak sah dari strategi yang dikembangkan para sarjana ini yang terdengar tidak sah. Jika itu hanya berarti menggunakan penerimaan pajak dari konstituen yang lebih luas untuk membiayai barang publik lokal di konstituen yang lebih kecil, maka konsep tersebut harus mencakup pengeluaran sumber daya publik nasional untuk membangun sekolah atau jembatan di wilayah atau daerah tertentu. Jika pengeluaran semacam itu tidak benar, hal ini pasti karena alasan selain transfer antar pemerintah yang terlibat (Stokes, dkk, 2013).

Perbedaan konseptual antara distribusi terprogram dan non-program tidak hanya dilihat dari sisi akademis, semua negara demokrasi memiliki undang-undang yang melarang perdagangan suara. Di tempat-tempat di mana undang-undang ini ditegakkan, hakim harus menarik garis antara pengerahan sumber daya secara legal dan pembelian suara yang ilegal, ketika mereka melakukannya, publisitas ikut andil didalamnya (Stokes, dkk, 2013). Penjelasan mengenai distribusi programatik jika dikaitkan dengan konteks bantuan sosial dapat diartikan bahwa dalam proses dan prosedur pendistribusian bantuan sosial baik yang berupa uang, pulsa atau sembako maka prosesnya haruslah melalui proses yang terprogram, memiliki kriteria-kriteria tertentu, serta tidak ada perantara atau partisipan yang akhirnya akan menjadi hubungan patron klien dalam proses pendistribusian bantuan sosial tersebut. Tidak ditemukan bentuk politik kekerabatan dan klientelisme merupakan bentuk dari distribusi yang terprogramatis.

## 2. Non Distribusi Programatik

- a. Bias Partisan

Dalam beberapa situasi, distribusi diskriminatif secara politik menghasilkan huungan di antara penerima yang menjadi target, sebagai imbalannya penerima yang mendapat keuntungan tersebut dan lebih mendukung kandidat atau partai yang memberinya keuntungan, akan tetapi penerima yang membelot dan memilih partai lain juga tidak bersalah karena hal tersebut merupakan pilihan mereka. Pertimbangan seseorang dari konstituen penting yang memperoleh akses ke program anti kemiskinan, yang pada dasarnya menyalahi orang-orang yang lebih membutuhkan program tersebut. Hal ini dapat didefinisikan situasi yang memanfaatkan individu tidak bersyarat. Jika program menargetkan kolektivitas, seperti konstituen geografis, hal ini dapat disebut politik gentong babi, yaitu memanfaatkan individu tanpa syarat yang memiliki maksud dan tujuan agar dapat menambah atau menarik perhatian rakyat terhadap kandidat atau partai. Dari perspektif teori demokrasi normatif, kesulitan utama yang diangkat oleh keuntungan individu non-kondisional adalah keberangkatan dari publisitas (Stokes, dkk, 2013).

#### b. Klientelisme

Dalam hal ini, pihak yang berkepentingan menawarkan keuntungan materi hanya dengan syarat bahwa penerima membalas budi dengan dukungan suara. Pemilih mendapat hukuman (atau cukup takut bahwa dia akan menerimanya) jika dia membelot dari tawar-menawar implisit dari keuntungan untuk imbalan dukungan suara, tetapi ketakutan akan hukuman mengubah sumbangan distributif menjadi suara. Hal ini disebut dengan distribusi non-program yang dikombinasikan dengan persyaratan klientelisme. Oleh karena itu, tawaran keuntungan dalam pertukaran langsung untuk menarik dukungan atau suara memiliki kekuatan untuk mengalahkan pertimbangan lain dalam pilihan pemilih. Dalam pengaturan seperti itu, memanfaatkan individu dengan kondisional-klientelisme merupakan jalan pintas. Mereka dapat menumpulkan suara dukungan untuk pemilu sebagai instrumen untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dan untuk mengkomunikasikan distribusi preferensi pemilih (Stokes, dkk, 2013). Pertukaran transaksional antara suara dan barang publik selain terkait dengan konsep pembelian suara, juga sulit dipisahkan dari konsep *pork-barrel* dan mobilisasi politik menggunakan program sosial (*programmatic mobilization*). Untuk memahami konsep pembelian suara secara utuh, sangat penting untuk mengetahui perbedaan antara konsep tersebut dengan konsep *pork barrel* dan mobilisasi politik menggunakan program sosial (Stokes, dkk, 2013).

*Pork barrel* yang juga sering disebut sebagai politik distribusi (distributive politics) dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk penyaluran bantuan materi (sering dalam bentuk kontrak, hibah, atau proyek pekerjaan umum) ke kabupaten/kota dari pejabat terpilih. Secara umum, dapat dikatakan bahwa *pork barrel* berasosiasi dengan proyek-proyek pekerjaan publik seperti proyek perbaikan jalan, perbaikan fasilitas disekitar sungai, dan perbaikan pelabuhan. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti bahwa *pork barrel* hanya



mencakup proyek-proyek fisik berupa perbaikan fasilitas publik, tetapi *pork barrel* juga dapat mengambil bentuk distribusi kesejahteraan (Stokes, dkk, 2013).

Secara umum, perkembangan studi klientelisme dapat dibagi ke dalam tiga kategori periode (Roniger 2004, dalam Sumarto, 2014). Periode pertama adalah dari akhir tahun 1960-an sampai dengan awal 1970-an. Dalam periode ini, studi klientelisme mendiskusikan praktik klientelisme di masyarakat petani dan penggunaan sumber-sumber daya milik negara untuk dipertukarkan dengan dukungan politik. Generasi kedua studi klientelisme berkembang pada periode tahun 1980-an dan awal 1990-an. Pada periode tersebut, studi klientelisme memfokuskan bahasannya mengenai klientelisme sebagai suatu strategi mobilisasi politik dengan melibatkan jaringan klientelisme yang mencakup berbagai macam segmen, kelompok, dan partai politik (Roniger 2004, dalam Sumarto, 2014). Lalu, gelombang ketiga berkembang pada periode 1990-an dan awal 2000-an memfokuskan kajiannya mengenai keterkaitan antara masyarakat sipil, institusi informal, dan relasi antara warga negara dengan politisi.

Secara umum, definisi konsep klientelisme dapat dibagi menjadi dua, yaitu definisi yang bersifat makro dan yang bersifat mikro. Pada tingkatan makro, Lemarchand dan Legg (1972) mendefinisikan konsep klientelisme sebagai suatu relasi antaraktor atau sejumlah aktor yang bersifat personal, emosional, dan resiprokal untuk mengontrol sumber daya yang timpang dan melibatkan transaksi yang saling menguntungkan. Briquet (2007) mendefinisikan klientelisme sebagai suatu relasi antarindividu yang memiliki status tidak setara (seorang patron dan kliennya) yang melibatkan pertukaran timbal balik antara barang dan pelayanan berdasarkan suatu jaringan personal yang dirasakan oleh keduanya sebagai suatu kewajiban moral. Definisi klientelisme yang disampaikan oleh Magaloni (2006) yang memberikan batasan klientelisme sebagai suatu relasi personal dua arah yang bersifat asimetris dan resiprokal di mana seorang patron memberikan barang wujud materi lainnya yang diperlukan oleh kliennya untuk dipertukarkan dengan loyalitas dariklien kepada patronnya (Sumarto, 2014).

Definisi konsep klientelisme yang bersifat makro mencakup dua bentuk klientelisme yang secara konseptual telah disampaikan oleh Weingrod (1968), yaitu klientelisme dua arah yang bersifat tradisional (*traditional dyadic clientelism*) dan klientelisme yang berkaitan dengan partai politik (*political party-directed clientelism*). Dalam konteks distribusi perlindungan sosial, bentuk klientelisme yang pertama merujuk pada suatu jaringan klientelistis yang dibangun oleh patron yang memberikan perlindungan sosial secara informal untuk anggota masyarakat miskin yang berstatus sebagai klien. Sementara itu, bentuk klientelisme yang kedua menunjuk pada suatu mekanisme ketika politisi memberikan pelayanan sosial atau berbagai bentuk perlindungan sosial untuk dipertukarkan dengan dukungan politik berupa suara pemilih (Sumarto, 2014). Konsep

klientelisme sering ditempatkan dalam posisi yang memiliki arti tidak berbeda dengan patronase (*patronage*). Konsep patronase didefinisikan sebagai suatu relasi dua arah ketika seseorang yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan pada orang lain yang memiliki status sosial ekonomi lebih rendah (klien) yang memberikan dukungan dan bantuan kepada patron. Beberapa karakteristik dari hubungan patronase adalah seperti bersifat personal, informal, sukarela, resiprokal, tidak setara dan bersifat dua arah (Eisenstad dan Roniger 2004 dalam Sumarto, 2014). Hubungan hierarkis patron-klien ini berdiri kuat karena klienelisme mampu memberi perekat relasi patron dan kliennya yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pemberian perlindungan dan distribusi kesejahteraan. Melalui struktur jaringan piramida yang kokoh ini, jaringan klientelistis mampu mendistribusikan kekuasaan dan kesejahteraan sehingga klientelisme dapat diterima di masyarakat yang belum demokratis (Blank 1974 dalam Sumarto, 2014).

Jika sebelumnya penjelasan mengenai distribusi programatik atau distribusi yang terprogram merupakan proses pendistribusian yang benar dan memang seharusnya diterapkan, maka non distribusi programatik adalah kebalikan dari istilah sebelumnya. Sangat menganut bias politik mereka dan klientelisme merupakan ciri dari non distribusi programatik. Dalam konteks distribusi bantuan sosial covid- 19, bias partisan dapat berasal dari pendukung, kerabat atau rekan yang menganut dan mengikuti orang-orang yang berhubungan langsung dengan pendistribusian bansos. Sedangkan klientelisme secara garis besar, dapat dipahami sebagai relasi kuasa antara aktor politik yang memberikan sesuatu (patron) non-programatik dengan pihak yang menerima (klien) yang didasari oleh pemberian loyalitas oleh penerima (paternalistik) (Ramadhan, 2015).

Politik distributif tidak hanya tentang mencari perhatian untuk memberi dukungan saat momentum pemilu saja, melainkan dalam hal realisasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah politik distributif juga dapat terjadi pada berbagai kalangan. Salah satunya adalah tentang kebijakan pemberian bantuan sosial. Program bantuan sosial di Indonesia sebenarnya sudah terjadi sejak sebelum pandemi covid-19 tahun 2020, jauh sebelum itu program bantuan sosial sudah pernah diterapkan di Indonesia. Pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), program ini disebut dengan program bantuan langsung tunai (BLT) yang mana program ini diisukan sebagai proses mobilisasi pemilih dalam pemilihan presiden baik pada tahun 2005 maupun di tahun 2009. Program BLT merupakan salah satu program perlindungan sosial yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan rezim kesejahteraan dibawah program penanggulangan kemiskinan (Sumarto, 2014).

Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang didistribusikan secara selektif yang mana program ini

dikhususkan untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan atau miskin. Namun, akurasi distribusi perlindungan sosial yang dilakukan secara selektif ini sangat bergantung sepenuhnya pada indikator kemiskinan yang akurat dan data kependudukan terkini serta data yang valid (Sumarto, 2014). Politik distributif yang merupakan sebuah strategi politik yang melibatkan partisipasi warga dalam proses penentuan alokasi dan distribusi sumber daya. Strategi ini dapat dilakukan dari kalangan manapun baik pada level eksekutif, legislatif bahkan pada level akar rumput, dalam hal eksekutif dan legislatif Presiden dan atau DPR, berusaha agar tidak terjebak oleh kepentingan oligarki. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, politik distributif dapat dipandang dari dua sudut. Sudut pandang pertama adalah dari sudut pandang penguasa yang memiliki maksud untuk mempertahankan kekuasaan dengan pelibatan warga. Sudut pandang kedua adalah dari sudut pandang masyarakat yang merupakan sebuah sarana untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dengan melibatkan diri dalam proses alokasi dan distribusinya karena warga diberikan ruang untuk terlibat dalam perencanaan alokasi dan perencanaan distribusi dari sumber daya.

## **BAB III**

### **LANDSKAP TANGGULSARI KELURAHAN MANGUNHARJO**

#### **A. Kondisi Geografis Tanggulsari**

Tanggulsari adalah perkampungan nelayan atau pemukiman yang muncul dari pemukiman kembali dari perkampungan nelayan di pesisir utara Semarang, akibat dampak pembangunan. Wilayah Tanggulsari terletak di Kelurahan Mangunharjo (salah satu kategori termiskin di Kota Semarang) di Kecamatan Tugu Kota Semarang. Tanggulsari yang merupakan wilayah Rukun Warga (RW) 05 Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang adalah organisasi bakti sosial bagi masyarakat yang mewakili seluruh warga pura dan beranggotakan 05 Rukun Tetangga (RT). Sebagian besar pendapatan warga Tanggulsari adalah berprofesi sebagai nelayan. Beberapa dari mereka bekerja sebagai buruh, lalu pengembangan usaha UMKM budidaya hasil laut dan tambak, dan hanya sedikit yang bekerja di sektor jasa, bahkan terdapat warga Tanggulsari yang juga berprofesi sebagai tenaga serabutan saja. Tingkat pendidikan di wilayah ini rata-rata rendah, dan banyak anak usia sekolah lebih memilih bekerja daripada duduk dan belajar di sekolah karena masalah perekonomian. Rukun Warga (RW) 005 Mangunharjo merupakan Lembaga Masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan memelihara nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelan Rukun Warga (RW) tercipta melalui upaya musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT) di wilayah kerjanya di bawah arahan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan keputusan Lurah.

Dalam menyebutkan pentingnya hidup berkeluarga dengan hewan peliharaan dan pentingnya bermasyarakat di lingkungan RW.005 Kel. Mangunharjo, sehingga RW.005 dituntut untuk “membina, mengembangkan dan meningkatkan kerukunan dan kerjasama secara terorganisir dalam suatu jangkauan yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan mengingat hasil proyek bangsa dan Negara Indonesia yang menistakan Pancasila dan Undang- Undang. Tanggulsari Rukun Warga (RW) 05 adalah salah adalah satu-satunya desa di kota Semarang yang cocok dengan kategori orang miskin ini. Buruknya Kondisi Kelurahan Mangunharjo disebabkan oleh keadaan wilayah Tanggulsari. Tanggulsari menempati +/- 4 hektar sawah di tikungan depan tepi Sungai Plumbon, masing-masing +/- 1,5 km, dan +/- 3,5 km dari pantai dan +/- 3,5 km dari Jalan Raya Semarang Kendal. Sawah yang menjadi tempat tinggal warga Tangulsari berada pada ketinggian yang sama dengan persawahan di kiri dan kanan. Selama konstruksi, tidak ada survei tanah pada waktu itu. Oleh karenanya, wilayah Tanggulsari ini rawan terkena bencana banjir. Seiring waktu, penduduk yang memiliki biaya lebih berusaha meningkatkan bangunan rumah mereka dengan biaya sendiri.

Kampung yang terdiri dari 03 Rukun Tetangga (RT) ini merupakan wilayah RW 05 Kelurahan Mangunharjo yang secara geografis terpisah dari desa-desa lainnya di Kelurahan Mangunharjo di Kecamatan Tugu. Sebelah timur berbatasan dengan Ngebruk (Kelurahan Mangunharjo) dengan jarak +/- 1 km dipisahkan oleh tambak dan persawahan, dan sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Pondoksari (Kelurahan Mangkangkulon). Jarak +/- 750 m dipisahkan oleh persawahan, di sebelah barat adalah Sungai Plumbon dan sebuah kolam (tidak ada desa). Di utara, ada kolam ke laut dalam jarak +/- 1,5 km (tidak ada desa).

Gambar 2. Peta Kelurahan Mangunharjo diantara 7 Kelurahan se-Kecamatan Tugu



Sumber : Arsip Kelurahan Mangunharjo

Gambar 3. Peta Kecamatan Tugu (Nomor 16) diantara 16 Kecamatan se-Kota Semarang



Sumber : Arsip Kelurahan Mangunharjo

Tabel.1 Susunan Organisasi Rukun Warga (RW) 05 Kelurahan Mangunharjo Semarang

Nama Ketua RW	Yusuf Bahtiar
Masa Bhakti	2017-2021
Jumlah Rukun Tetangga (RT)	3 RT
Jumlah Penduduk (Jiwa/ KK)	197/ KK
Alamat Sekretariat	Tanggulsari, RW 05 Kelurahan Mangunharjo
Provinsi	Jawa Tengah
Kota/Kabupaten	Semarang
Kecamatan	Tugu
Kelurahan	Mangunharjo

Sumber : Administrasi Kelurahan Mangunharjo, tahun 2021

## Visi

Terwujudnya Masyarakat Kelurahan Mangunharjo yang religius, taat, dan beranggotakan orang-orang pekerja keras

## Misi

1. Adanya pelayanan publik prima secara konsisten di segala bidang.
2. Pasti ada kemajuan di bidang pertanian dan perikanan.
3. Terjadi peningkatan yang nyata pada kualitas substansi keseharian manusia di bidang pelayanan.
4. Kegiatan Keagamaan Terlaksananya Bagi Semua Warga Masyarakat.
5. Ada hubungan yang kuat antara pemerintah rakyat dan bisnis.

## B. Kondisi Demografis Tanggulsari

### 1. Kependudukan dan Mata Pencaharian

Dalam 1 Rukun Warga (RW) yang terdiri dari 3 Rukun Tetangga, terdapat 197 Kepala Keluarga (KK) yang mewakili warga Tanggulsari (RT). Mereka memiliki pemukiman yang kuat yang terdiri dari tiga blok atau gang perumahan, yang merupakan ciri khas mereka. Ada beberapa info tentang Tanggulsari Mangunharjo seperti yang tercantum di bawah ini:

Tabel 2. Data Kependudukan Tanggulsari Ru05kun Warga (RW)

N O	WILAYAH	Σ KK	USIA		Σ
			PRODUKTIF	NON PRODUKTIF	
1	RT 01	55 KK	151	50	201
2	RT 02	77 KK	192	81	273
3	RT 03	65 KK	122	72	194
JUMLAH		197 KK	465	203	668

Sumber : Arsip Kelurahan Tahun 2021

Hampir semua masyarakat Tanggulsari (sebagai nelayan atau pengusaha nelayan) yang bekerja di sektor perikanan adalah anggota kelompok lama (bapak). Kaum muda lebih

memilih untuk bekerja secara mandiri sebagai pekerja konstruksi atau buruh pabrik. Situasi ini tentu membahayakan kelangsungan hidup nelayan dalam jangka panjang dan berdampak buruk bagi industri perikanan karena makin berkurangnya warga masyarakat yang bersedia menjadi nelayan. Dalam kasus masyarakat Tanggulsari, seorang perempuan atau teman yang aktif menggeluti profesinya berperan sebagai nelayan peran kepala rumah tangga yang harus diperankan. Perempuan tidak hanya tinggal di rumah sebagai istri, tetapi juga mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Sebagai pedagang ikan segar dan ikan panggang, Paraistri bekerja (baik Pasar Mangkang, Pasar Karangayu, dan Pasar Pagi Kaliwungu) selain itu mereka juga mengembangkan usaha budidaya ikan dan kerang (ikan bakar, kerupuk, terasi), serta beberapa ada yang bekerja sebagai seorang karyawan pabrik. Bagi yang memiliki dana cukup, akan berfungsi sebagai kapal Ikan Hasil Tangkapan dan juga mengeksport kembali rajungan dan rajungan yang dikirim ke Semarang. Biasanya, kapal dan perahu yang mendarat, diperbaiki dan dicat saat tangkapan laut mulai menurun. Wanita membantu suami mereka, juga memeriksa jaring yang sobek dan pada saat yang sama menjahit atau menyulam ulang. Melihat kegigihan para nelayan ini, peningkatan ekonomi keluarga yang sebenarnya dapat berasal dari para istri nelayan. Melihat situasi tersebut, masih sangat diperlukan mencari model kegiatan pelatihan, pembinaan dan pendampingan yang terbaik untuk meningkatkan ekonomi keluarga berbasis para istri pada komunitas nelayan Tanggulsari.

### **C. Kondisi Sosial Ekonomi**

Masyarakat Tanggulsari dikenal menjadi warga yang mempunyai solidaritas yang tinggi, Sistem bantu-membantunya saat ini adalah metode untuk mengenali pekerjaan yang buruk. Selain karena adanya rasa saling membutuhkan pada jiwa kenelayannya, kesadaran untuk saling membantu sesamanya buka semata karena senang berbakti sesamanya. Untuk meningkatkan derajat kesejahteraan hayati di antara mereka perlu diketahui potensi kerukunan ini. Hal ini membuat metode pembangunan sosial lain yang ditawarkan menjadi lebih berbahaya dan cenderung meningkatkan keresahan dan instabilitas masyarakat Tanggulsari. Beberapa bantuan sosial yang saat itu terdapat di Mangunharjo adalah seperti bantuan sosial reguler, bantuan sosial khusus, dan bantuan tanggap darurat adalah tiga kategori bantuan sosial yang ditetapkan Kementerian Sosial Indonesia sebagai kebutuhan untuk pelaksanaan bantuan sosial di bawah COVID-19. (Muslim Sabarisman, 2020). Rincian inisiatif sosial ini adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial Reguler terdiri dari dua program, yaitu: a) Program Keluarga Harapan (PKH), dengan perkiraan Rp. Pembiayaan sebesar 37,4 triliun, dan target sasaran hingga 10,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan jangka waktu pencairan hingga tiga bulan per siklus dari April hingga Desember 2020. b) Program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT), yang sasaran sarasannya adalah meningkatkan KPM dari 15,2 menjadi 20, dan yang level pembiayaannya dibatasi Rp. 43,6 triliun, memiliki perkiraan jumlah anggaran sebesar Rp. 150.000 menjadi Rp. 200.000,-.



2. Bantuan Sosial Khusus adalah: a) Bantuan Sosial Pangan (Sembako) untuk lingkungan DKI Jakarta sebesar Rp. 2,3 triliun dengan target 1,3 juta anggota keluarga untuk warga Covid-19 dan anggaran Rp. 600.000,- per keluarga perbulan selama tiga bulan, yaitu April, Mei, dan Juni 2020, akan dipenuhi setiap dua minggu. b) Bantuan sosial pangan (sembako) sebesar Rp. untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). 1,08 triliun dengan target 600.000 anggota keluarga untuk warga Covid-19 dan tingkat pembiayaan Rp. 600.000,- per keluarga perbulan selama tiga bulan, yaitu April, Mei, dan Juni 2020, akan dipenuhi setiap dua minggu. c) santunan sosial untuk wilayah Jabodetabek dengan minimal donasi sebesar Rp. 16,2 triliun dengan target 9 juta kepala keluarga yang terjelek Covid-19 dan tidak mendapatkan pembayaran dari PKH dan Sembako dengan jumlah mendekati Rp. 600.000,- setiap keluarga setiap bulan dibagikan selama empat bulan.
3. Bantuan Tanggap Darurat Kementerian Sosial atau BTDKS adalah pemberian pelayanan sosial berupa makan dan jajanan gratis untuk penduduk DKI dengan anggaran tahunan minimal Rp.45 miliar dolar yang dijanjikan terdiri dari 300 miliar paket sembako untuk rakyat biasa senilai Rp. 200.000,- setiap paket akan dijual mulai tanggal 7 April 2020. b) Bantuan Santunan Kematian dengan nilai Signifikan Rp. 15 juta diberikan kepada keluarga Waris yang menderita akibat Covid-19 dengan indeks bantuan sekitar Rp. 15.000.000/jiwa.

Selain itu, masyarakat tanggulasi keseharian kehidupan sosial keagamaan juga berkontribusi dalam hal ini. Beragam jenis kegiatan keagamaan seremonial meningkatkan taraf hidup masyarakat saat ini. Selain itu, ada ritual sosial yang disebut keagamaan:

- a. Manaqiban, atau studi ritual atas kitab manaqib Syekh Abdul Qodir Jailani, adalah yang dimaksud dengan istilah ini. Setiap tanggal 11 penanggalan Imlek, diadakan manaqib di masjid yang dihadiri oleh sebagian besar masyarakat Tanggulsari.
- b. Mauludan barzanji, juga dikenal sebagai keagamaan seremonial, melibatkan mempelajari kitab barzanji Maulid Nabi Muhammad saw. Acara saat ini diadakan setiap satu bulan Sabtu dua kali, yaitu setiap Kamis siang ketika anggota komunitas Tanggulsari berkumpul di masjid.
- c. Yasinan tahlil, juga dikenal sebagai keagamaan seremonial, mengharuskan mempelajari teks Yasin dan Tahlil. Setiap pagi saat Jum'at, sang ayah mengikuti acara ini dengan berdoa di masjid.

Selain itu, perekonomian wilayah Tanggulsari tidak terlepas dari perkembangan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan kebijakan pemerintah desa Tanggulsari beberapa tahun yang lalu. Semua itu mempengaruhi ritme kehidupan Tanggulsari dalam kadar yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan peningkatan dalam kasus yang jarang terjadi, pergeseran ke bawah. Selain itu, Nelayan Tanggulsari terletak di wilayah yang memiliki tingkat pemahaman hukum dan stabilitas keuangan yang tinggi. Jika dibandingkan dengan profesi lain, jumlah Nelayan Tanggulsari yang bekerja di sektor perikanan terlihat cukup dominan. Karena itu, hasil perikanan seringkali mempengaruhi perekonomian masyarakat Tanggulsari. Dua kategori nelayan sosial yang paling umum di Indonesia adalah nelayan

tradisional dan nelayan buruh. Mereka adalah produsen utama produk tangkap perikanan nasional. Meskipun demikian, posisi sosial mereka tetap terpinggirkan dalam konteks transaksi ekonomi yang serba cepat dan berlebihan, yang mencegah mereka untuk sepenuhnya menyadari potensi mereka sebagai produsen. Pihak yang paling rentan adalah pedagang ikan skala besar atau perantara.

Para pedaganglah yang secara konsisten berperan sebagai pemimpin ekonomi di desa-desa nelayan. Tanpa perlu memahami bagaimana melakukan intervensi, situasi yang dijelaskan di atas terus memburuk (Bangsawan, 2015). Masyarakat nelayan hidup, tumbuh, dan berkembang di wilayah pesisir atau wilayah pantai sebagai satu lembaga sosial. Masyarakat Nelayan merupakan komponen konstruksi sosial masyarakat kawasan pesisir, meskipun diakui tidak semua desa-desa di sana berpenduduk sebagai nelayan. Meskipun demikian, di daerah-daerah di mana sebagian besar penduduknya diidentifikasi sebagai nelayan, petambak, atau pembudidaya perairan, kebudayaan nelayan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap identitas penduduk pesisir secara keseluruhan. (Ginkel, 2007). Pembudidaya perairan, petambak, dan nelayan adalah contoh kelompok sosial yang terkait erat dengan distribusi pesisir dan biaya daya. Masyarakat nelayan memiliki ciri-ciri perilaku sosial yang dipengaruhi oleh karakteristik kondisi geografis dan mata pencaharian penduduknya, sebagai suatu kesatuan sosial-budaya. Mayoritas perilaku lingkaran sosial yang sedang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Etos kerja tinggi untuk mencapai kemakmuran dan memenuhi kebutuhan hidup.
2. Kompetitif danantang diri Anda untuk mencapai tujuan Anda.
3. Presiasi diarahkan pada kinerja orang lain dan melibatkan keahlian.
4. Terbuka dan ekspresif, membuat cenderung "kasar".
5. Solidaritas sosial yang kuat saat menghadapi kendala bersama, seperti menghadapi musibah bersama atau saling mendukung.
6. Kemampuan untuk beradaptasi dan menjalani kehidupan yang utuh pada level yang tinggi.
7. "Konsumtif" Bergaya hidup.
8. Pajangan "keberhasilan hidup" dalam kehidupan sehari-hari, seperti emas, kendaraan, bangunan rumah, dan barang sejenis lainnya.
9. "Agamis", dengan perasaan agama yang kuat.
10. Tempramen jika berkaitan dengan "harga diri".

Jika digunakan untuk membangun populasi nelayan atau pesisir, sebagian besar norma sosial yang tercantum di atas merupakan moda sosial yang cukup mahal. Selain itu, sebagaimana dikemukakan di atas, pernyataan-pernyataan tertentu yang diucapkan oleh para pemimpin dan anggota kaum tani memiliki relevansi yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa Indonesia dan kepemimpinan. Penjelajahan terhadap nilai-nilai budaya kepesisiran ini tentu saja memiliki kontribusi yang sangat strategis untuk membangun masa depan bangsa yang berbasis pada potensi sumber daya nasional.

#### D. Kondisi Pendidikan

Perekonomian dan pendidikan masyarakat terlihat lemah dan tidak berdaya bagi masyarakat Tanggulsari. Jika tingkat pembelajaran seseorang rendah, bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin tentang peluang untuk meningkatkan rasa harga diri mereka? Hal ini ditunjukkan dalam tabel produktivitas produktif berdasarkan laju pembelajaran seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Tabel 3. Usia Produktif

Berdasarkan metrik pendidikan (Data diolah dari beberapa sumber yaitu data statistik kelurahan Mangunharjo, dan data buku administrasi PKK kelurahan Mangunharjo tahun 2021)

NO	RT	LULUS JENJANG PENDIDIKAN					JUMLAH (%)
		SD	SLTP	SLTA	S1 S2 S3	TIDAK / PERNAH SEKOLAH SD	
1	01 (55 KK)	97	32	6	-	16	151 (32 %)
2	02 (77 KK)	92	44	34	-	22	192 (42 %)
3	03 (65 KK)	46	31	12	-	33	122 (26 %)
JUMLAH (197 KK)		235 (51 %)	107 (23 %)	52 (11 %)	-	71 (15 %)	465 (100 %)

Sumber : Arsip Kelurahan Tahun 2021

Menurut data statistik, terlihat bahwa 15% penduduk Tanggulsari tidak memiliki akses pendidikan SD, sedangkan 51% penduduk produktif mengenyam pendidikan SD. Jelaslah bahwa bentuk pendidikan utama masyarakat Tanggulsari berkualitas rendah dan fakta ini kemungkinan besar berdampak pada tingkat kesadaran diri yang mereka tunjukkan di berbagai bidang. Bagi masyarakat Tanggulsari, satu-satunya pilihan sekolah adalah membaca dan menulis. Namun, bagi mereka, kemampuan untuk bekerja bukanlah hasil dari sekolah mereka yang berprestasi dan lebih merupakan hasil dari antusiasme mereka untuk terlibat dengan komunitas mereka sendiri sebagai sesama warga Nelayan. Jika mereka bersekolah di sekolah berbasis kejuruan atau yang berfokus pada aplikasi, pendidikan mereka akan lebih aman. Ada 11% dari populasi umum yang berpendidikan, tetapi mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bekerja di sektor perikanan atau nelayan. Mereka merasa lebih senang bekerja sebagai Karayawan di beberapa bisnis berbeda.

Mereka lebih senang bekerja sebagai pegawai di beberapa perusahaan swasta/pabrik yang berlokasi di sekitar Mangkang dan sekitarnya. Situasi ini membutuhkan pemikiran yang serius dan membutuhkan pemikiran dan penanganan.

### **E. Kondisi Politik**

Warga Tanggulsari Kelurahan Manguharjo Semarang diketahui memang tidak memiliki hubungan yang intens dengan golongan, kelompok atau partai politik yang berkepentingan. Mereka hanya menjalankan kewajiban sebagai warga negara untuk memiliki hak politik mereka ketika momen pemilu yaitu ikut berpartisipasi dalam proses pemilu. Partisipasi politik merupakan aspek terpenting dari demokrasi. Asumsi di balik demokrasi (partisipasi) adalah bahwa orang yang paling memahami apa yang terbaik bagi mereka adalah orang itu sendiri. Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, karena masyarakat berhak ikut serta menentukan keputusan yang mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan.

Partisipasi politik masyarakat umum terdiri dari dua hal yang tercantum di atas: melemahkan aturan hukum dan secara efektif mengkomunikasikan perumusan dan pelaksanaan tujuan politik. Masalah mendasar yang diberikan oleh masyarakat di dalam hal ini nelayan adalah kualitas sumber daya manusia yang rendah karena tingkat pendidikan mereka hanya lulusan Sekolah Dasar atau tidak tamat Sekolah Dasar. Hal ini menghambat pemahaman masyarakat tentang dasar-dasar ketenagakerjaan, visi, dan tujuan bisnis di bawahnya, serta lokakarya yang mencerahkan tentang bagaimana memaksimalkan potensi kegiatan ekonomi harian secara produktif dan efisien (Kusnadi : 2009).

Diperkirakan bahwa partai politik masyarakat nelayan akan dapat memperoleh hasil tertentu yang tidak menguntungkan dari pelaksanaan proyek pembangunan masyarakat di beberapa daerah. Pertama, program pembangunan masyarakat Desa ditujukan untuk mengurangi risiko kemiskinan dan kesengsaraan penduduk.<sup>3</sup> Tujuan kedua adalah meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan dengan meningkatkan tingkat aktivitas, kreativitas, dan atribut lainnya. Perlu ditempuh kebijakan yang meningkatkan produktivitas rumah tangga, swadaya, dan ketinggian daya sebagai bagian dari upaya pengurangan kemiskinan pada seluruh lapisan masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan ekonomi yang bertumpu pada peningkatan upah, gaji, dan standar hidup untuk masyarakat umum. Peranan lembaga-lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan keempat, meningkatkan dan memanfaatkan. Kelima, pembangunan Desa diarahkan untuk lebih mengutamakan Desa dengan masyarakat yang relatif miskin, masyarakat terpencil, masyarakat di wilayah kritis, wilayah pantai, kepulauan terpencil, dan masyarakat dalam wilayah pantai dan sebagainya. memastikan bahwa rasa aman masyarakat umum tidak menurun. Masyarakat Nelayan Mengatasi Ia Mengatasi Kompleks, baik masalah Kependudukan/sumber Daya Manusia, Permasalahan Potensi Alam Daratan, atau Perairan Sebagai Lahan Masyarakat Nelayan Mencari Nafkah (Kusnadi : 2009).

Meski masyarakat awam kurang memahami beberapa aspek teknis operasi militer, seperti bagaimana menerjunkan calon pilihannya, manuver legislatif dan presiden yang dilakukan di Tanggulsari RW 005 berjalan dengan baik. Pasalnya, jumlah penduduk Tanggulsari RW 005 sangat besar sehingga banyak orang yang hanya sedikit yang mampu memahami apa yang dibaca. Platform politik yang ditawarkan kepada masyarakat Tanggulsari diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan mendesak yang akan muncul dalam pelaksanaan program pembangunan massal, seperti kebutuhan untuk mengatasi dan memitigasi kemiskinan dan kesengsaraan yang mungkin terjadi di kalangan masyarakat. Kemudian, untuk dapat menciptakan masyarakat yang setiap orang terlibat dalam membangunnya dan berpartisipasi di dalamnya, serta strategi penanggulangan kemiskinan di setiap pelosok penduduk, harus ada strategi peningkatan hari demi hari. produktivitas, swadaya, dan sumber daya alam antara lain. Barulah kita dapat mewujudkan kehidupan ekonomi yang dilandasi dengan inisiasi lapangan kerja, peningkatan elevasi dan pemanfaatan kapasitas organisasi masyarakat yang berperan sebagai wakil rakyat dalam proses pembangunan. Pembangunan didorong untuk lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat, antara lain kelompok minoritas, daerah berpenduduk rendah, daerah kiritist, daerah pantai, dan pulau-pulau kecil terpencil.

## **BAB IV**

### **POLA DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL SEMBAKO PANDEMI COVID-**

#### **19**

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia ini bukan merupakan hal yang baru, saat setelah memenangkan pemilu 2009 dan terpilih kembali sebagai presiden, pemerintahan Presiden SBY membentuk lembaga yang disebut dengan TNP2K. Tim ini dibentuk berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 dengan masa kerja dari tahun 2010 sampai akhir masa jabatan Presiden SBY, yaitu tahun 2014. Secara umum, TNP2K dirancang untuk melaksanakan perlindungan program jejaring sosial serta program penanggulangan kemiskinan, serta melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program. Selain itu, fungsi lain dari tim ini juga melakukan pengawasan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Perpres No. 15 Tahun 2010 memberikan mandat kepada wakil presiden untuk menjadi ketua TNP2K. (Sumarto, 2014)

Selama pembentukannya, TNP2K banyak menuai kontroversi karena beberapa hal. Pertama, wilayah kerja TNP2K tumpang tindih dengan ranah tanggung jawab lembaga pemerintah yang lain, yaitu Bappenas, Kemerkokoesra, dan Kemensos. Fungsi TNP2K dapat dilakukan oleh ketiga lembaga itu sehingga seharusnya TNP2K tidak perlu dibentuk. Kedua, TNP2K diketuai oleh wakil presiden yang sebenarnya bukan dalam posisi yang tepat untuk mengurus masalah teknis terkait program penanggulangan kemiskinan, karena program tersebut dapat dikelola oleh menteri. Selain itu, banyak yang menilai bahwa seharusnya wakil presiden hanya fokus mengurus fungsi urusan kenegaraan seperti menyusun program dan agenda kerja kabinet. Ketiga, karena poin pertama dan kedua, muncul kesan bahwa pembentukan TNP2K lebih didasari untuk mengontrol pengelolaan program sebagaimana yang telah dilakukan untuk membangun “bendera” identitas yang siap diklaim pada masa kampanye menjelang pemilu (Sumarto, 2014). Pada tahun 2008, terdapat lebih dari lima puluh program yang tercatat sebagai bagian dari payung program penanggulangan kemiskinan salah satu contohnya adalah JPS (Jaring Pengaman sosial) yang mana Inisiatif ini dimaksudkan untuk membantu rumah tangga miskin. menghadapi kesulitan ekonomi akibat krisis ekonomi yang menghantam negara saat tahun 1998 (Bappenas 2008, dalam Sumarto, 2014). Berdasarkan kesepakatan SSNAL, program JPS Mencakup lima program, yaitu beasiswa untuk siswa miskin, beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin (raskin), Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK), Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (9PDM), raskin, dan Padat Karya Sektor Pekerjaan Umum Cipta Karya (PKSPU-CK) (Bank Dunia, 1999c dalam Sumarto, 2014). Saat realisasi program JPS, progra ini hanya mencakup lima program yang bersifat lebih mikro, tetapi pada periode berikutnya, saat JPS diganti dengan

program penanggulangan kemiskinan, faktanya terdapat lebih dari lima puluh program. Selain itu, jumlah program yang terlalu banyak menimbulkan pertanyaan mengenai kapasitas pemerintah dalam mengelola dan mengontrol program-program tersebut.

Dalam melakukan tugas integrasi dan sinkronisasi merupakan tugas yang sulit karena dihadang oleh dua masalah utama. Pertama, posisi wakil presiden sebagai ketua TNP2K dan posisi perpres sebagai landasan hukumnya tidak cukup kuat untuk mendorong konsolidasi lintas kementerian guna menyelenggarakan integrasi dan sinkronisasi program. Ketika wakil presiden memerintah meneri atau pejabat kementerian untuk melakukan koordinasi, misalnya, belum tentu perintah ini dipatuhi karena menteri tidak harus bertanggung jawab kepada wakil presiden. Dalam keadaan seperti ini, koordinasi lintas kementerian sebagai elemen penting dari integrasi dan sinkronisasi belum tentu dapat dilakukan dengan optimal. Kedua, menteri atau pejabat kementerian khawatir bahwa integrasi dan sinkronisasi program mengharuskan mereka kehilangan anggaran program penanggulangan kemiskinan yang telah dikelolanya. Selain dapat memberikan keuntungan ekonomi, program penanggulangan kemiskinan dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan perolehan suara dalam pemilu. Misalnya, program PNPM perdesaan telah digunakan sebagai alat untuk mobilisasi politik dengan meminta pimpinan partai politik menunjuk posisi fasilitasi di perdesaan untuk memperkuat kerangka politik pelaksanaan program (Sumarto, 2014).

Karena kompleksitas masalah teknis dan politis tersebut, TNP2K tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. melalui mandat integrasi dan sinkronisasi program, seharusnya program yang tumpah tindih dan program yang kurang penting diintegrasikan dan disistematiskan sehingga jumlahnya berkurang dalam batas jumlah program yang dapat dikelola dengan mudah. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan. Yang dapat dilakukan TNP2K adalah Satu-satunya cara untuk memastikan bahwa setiap program menggunakan data yang identik dan input yang cocok adalah dengan mengintegrasikan penggunaan data dan teknik implementasi program (Sumarto, 2014).

#### **A. Bantuan Sosial Covid-19 : Gambaran Umum Program Sembako**

Program Sembako merupakan program jejaring sosial pangan yang akan mulai dilaksanakan Pemerintah pada tahun 2020 dan merupakan perpanjangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Ditawarkan kepada masyarakat yang melihat manfaat untuk dapat mengakses jejaring sosial pangan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai alat pembayaran dengan fitur seperti tabling atau uang elektronik yang dapat digunakan sebagai media jejaring sosial. Hal ini dijelaskan secara rinci dalam Pedoman Umum Program Sembako. Pedoman Umum Program Sembako merupakan revisi dari Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai sebelumnya dan dapat digunakan sebagai bantuan teknis oleh pelaksana program seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, bank, e-warung sebagai agen pembelian pangan, dan organisasi terkait lainnya (Program Pedoman Sembako, 2020). Pedoman Umum Program Sembako diumumkan oleh Kementerian/Lembaga Lintas terkait yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden (Pedum Program Sembako, 2020).

Tujuan program sembako adalah untuk meningkatkan Beban Pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangannya sekaligus memberikan KPM lebih banyak gizi, meningkatkan sasaran, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi, serta memberikan pilihan dan kendali dalam pemenuhannya. kebutuhan pangannya. Setiap program yang bersifat sembako bermanfaat untuk meningkatkan kadar pang di KPM serta menjadi mekanisme ketahanan sosial dan kemiskinan serta meningkatkan efektivitas kontrak sosial; 3. meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap jasa keuangan dan perbankan; 4. meningkatkan transaksi nontunai dalam agenda GNNT (Gerakan Nasional Nontunai); 5. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang perdagangan; dan 6. Stunting termasuk gizi mencuahan pemenuhan pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) terlihat pada jangka panjang (Program Pedum Sembako, 2020).

## **B. Pola Distribusi Bantuan Sosial di RW 005 Kelurahan Mangunharjo**

Hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan data dan informasi mengenai bagaimana pola distribusi bantuan sosial sembako di wilayah Tanggulsari Rukun Warga (RW) 005 Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu formal dan informal. Data yang diperoleh ini sesuai dengan teori yang digunakan penulis dalam gagasan Stokes yang menyatakan bahwa ada dua jenis distribusi bantuan sosial yaitu distribusi programatik dan non-distribusi programatik. Distribusi programatik yang dimaksud dalam teori sendiri memiliki sifat yang terprogram dan demokratis, data yang diperoleh juga sesuai dengan teori yang disebutkan bahwa pola distribusi bantuan sosial sembako di Tanggulsari dalam penyampaiannya sudah dilakukan dengan formal dan demokratis yaitu di sampaikan sesuai dengan informasi awal.

Situasi awal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi masyarakat kelas menengah ke atas mungkin tidak bermasalah karena mereka sudah memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama kebutuhan pangan sehari-hari. Namun bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki jaring pengaman atau yang dalam kesehariannya hanya sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan timbul masalah ketika mereka tidak mampu lagi bekerja. Kondisi serupa mendorong pemerintah mengarahkan Kementerian Sosial RI untuk mempertimbangkan secara matang penerapan larangan sembako sosial. Dua hal yang harus diperhatikan Kementerian Sosial adalah pembayaran harus dilakukan dengan cepat dan akurat. Menggambarkan kondisi lapangan tentang sasaran sasaran bantuan sosial sembako di wilayah Tanggulsari Kelurahan Mangunharjo Semarang, seluk beluk kerentanan sasaran sasaran ini ditanyakan kepada ketua RT/RW atau seseorang yang ditunjuk dapat Tanggapan dari RT/RW atau seseorang yang tidak dapat fokus pada topik yang sedang dibahas untuk sekitar 37 orang.



Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dan Sesuai dengan Pernyataan Menteri Sosial Republik Indonesia No. Kriteria Kemiskinan dan Data Orang Fakir Miskin dan Unampu ada 14 (empat belas) Kriteria Kemiskinan. Menurut Kemensos RI, berlaku 14 (empat belas) kriteria kemiskinan:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup>.
2. Tempat tinggal jenis lantai dibuat dengan tanah murah, bambu, dan kayu.
3. Jenis dinding tempat tinggal berkualitas rendah dari bambu/rumbia/kayu/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air yang besar atau bersebelahan dengan rumah tangga lainnya.
5. Baik listrik maupun sumber penerangan rumah tangga tidak digunakan.
6. Sumber air minum berasal dari sumur, udara bebas, sungai, dan hujan udara bebas.
7. Kayu bakar, arang, dan minyak tanah adalah makanan pokok setiap hari.
8. Mengonsumsi daging, susu, dan/atau ayam seminggu sekali saja.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru setiap tahun.
10. Hanya makan satu atau dua kali sehari, minimal, yang dikonsumsi.
11. Tidak selalu harus membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik.
12. Sumber Penghasilan Kepala Rumah Tangga: Petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,- per bulan.
13. Tidak sekolah, tidak tamat SD, dan tidak SD adalah tujuan pendidikan utama rumah tangga.
14. Saya tidak memiliki barang yang dapat dijual dengan mudah minimal Rp 500.000, seperti motor kredit atau non kredit, emas, ternak, topi motor, atau barang modal lainnya.

Namun, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 tentang Bantuan Sosial, kriteria penerimaan bantuan sosial untuk pandemi Covid 19 adalah penduduk miskin dan rentan, serta anggota masyarakat umum yang ODP, PDP, atau Covid. 19 terinfeksi. Selain itu, yang berhak menerima tunjangan sosial yang ditetapkan dalam COVID 19 adalah karyawan usaha yang berafiliasi dengan PHK dan masyarakat yang membutuhkan bantuan segera karena tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. (Susanto, 2020). Kriteria sasaran yang menentukan kriteria calon keluarga penerima manfaat bantuan sosial sembako di tingkat RT/RW sangat beragam dan masih perlunya peningkatan fitur warganya, yang sangat perlu ditingkatkan.

Berbagai model yang saat ini digunakan di kalangan masyarakat umum menitikberatkan pada penekanan manfaat sembako bantuan. Pertama, tinjau daftar manfaat yang diberikan pemerintah. Kedua, melakukan musyawarah RT/RW dengan melibatkan penguasa dan perangkat RT/RW untuk memberitahukan masyarakat miskin. Langkah keempat adalah melakukan pemutakhiran ulang buatan sesuai dengan 14 kriteria BPS. Keempat, melakukan Musyawarah RT/RW dengan meminta bantuan dari tokoh-tokoh

aktif dan penduduk setempat untuk menyiagakan pihak-pihak yang miskin dan rentan. Setelah musyawarah RT/RW selesai untuk mengidentifikasi sipir yang mampu, bantuan diberikan kepada setiap sipir yang telah memberikan daftar sipir yang mampu. Keenam, lakukan Musyawarah RT/RW dengan mengikutsertakan semua orang untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pihak yang miskin dan rentan yang bertikai. Namun kenyataannya, beberapa kesalahpahaman dapat terjadi selama proses pendistribusian berlangsung, seperti kesalahpahaman data seperti yang diungkapkan oleh staf Kelurahan Mangunharjo yang saat ini sedang menyelesaikan pendataan dari RW terkait.

“Penyebab ketidak sesuaian data apabila data penerima berasal dari Kementerian Sosial adalah Konflik sosial akan terjadi jika salah satu ketua RT/RW menolak pengiriman paket Bansos kepada pihak yang bertikai. Selain yang sudah diperoleh, ada RT/RW tertentu yang belum dibagikan kepada pihak yang bertikai karena disadari akan merugikan pihak yang bertikai dan akhirnya menimbulkan konflik sosial. Hal ini menjadi masalah karena data yang digunakan untuk mengidentifikasi Bansos saat ini tidak sesuai dengan pendataan pemutakhiran yang telah dilakukan bersama dengan organisasi terkait.” (Wawancara, Rifan Yahya, 12 Agustus 2022)

Sebelum menjelaskan tentang ketidaksesuaian data yang diperoleh, peneliti berusaha bertanya terkait bagaimana pola distribusi yang dilakukan dalam proses pendistribusian bantuan sosial lain terutama sebelum adanya Covid-19.

“Iya ada mbak Sebelum Covid-19, ada program kesejahteraan sosial lainnya seperti Bantuan Sosial untuk Lansia dan PKH, namun setelah Covid-19, pemerintah memberikan program kesejahteraan sosial dalam bentuk sembako dan intermittent payment selama ini memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) sampai dengan Rp. 300.000 per bulan kepada penduduk kelas ekonomi bawah yang terdampak Covid-19, tapi kan kalo BST itu ngambil sendiri ya, nah yang disalurkan lewat RT itu hanya sembako” (Wawancara, Istirokah, 12 Agustus 2022)

Lebih lanjut, peneliti bertanya terkait dengan tahap penyaluran Bantuan Sosial Sembako yang dilaksanakan, adapun tanggapan yang diberikan oleh staf kelurahan sebagai berikut:

“Warga kelurahan Mangunharjo akan mendapatkan empat Tahapan Bantuan Sosial Tunai (BST).” (Wawancara, Rifan Yahya, 12 Agustus 2022).

Kemudian subjek menanyakan kepada informan mengenai waktu proses pemilihan calon Bantuan Sosial Sembako tersebut adapun tanggapan yang diberikan oleh staf bagian Sosial Kelurahan Mangunharjo sebagai berikut:

“Agar proses penjangkaran Bantuan Sosial Sembako dan bantuan lainnya efektif bagi KPM yang diakui, kami selaku pengurus masyarakat meminta data dari masing-masing dari RW.” (Wawancara, Syafa’ati Nurgiyanti, 12 Agustus 2022)

Peneliti berbicara lebih lanjut dengan informan, “Apakah ada kriteria khusus untuk menerima Bantuan Sosial Sembako, atau adakah informasi yang diberikan oleh informan seperti yang tercantum di bawah ini?”:

“Tentu saja, untuk mencari calon penerima sembako ya mbak yaitu terfokuskan kepada masyarakat yang berekonomi rendah akibat Covid-19 dan tidak menerima bantuan sosial lainnya.” (Wawancara, Syafa’ati Nurgiyanti, 12 Agustus 2022)

Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang bersifat universal mengenai pengertian keefektifan karena ada begitu banyak defenisi yang menjelaskan atau menggambarkan tentang keefektifan. Oleh karena itu penelitian ini dikemukakan beberapa defenisi tentang keefektifan ataupun efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, bisa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan, dapat dikatakan juga bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009)

Menurut Budiani dalam Pratiwi dan Nurcahyanto (2017:3) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berikut, dan berdasarkan pada variabel tersebut didapatkan pula data hasil penelitian di Mangunharjo seperti:

#### a. Ketepatan Sasaran Program

Pemahaman Program dalam hal ini sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Peneliti mengajukan pertanyaan perihal ketepatan sasaran distribusi bantuan sosial di Tanggulsari oleh Ketua RW yang mana dalam wawancara tersebut Ketua RW menyatakan bahwa menurutnya distribusi bantuan sosial sembako yang dilakukan sudah sesuai prosedur dan tepat sasaran.

“saya mendata penerima bansos sembako waktu itu berdasarkan keadaan ekonomi para warga jadi dinilai sudah tepat sasaran” (Wawancara, Yusuf, 30 Desember 2022).

Hal tersebut tentu bertentangan dengan apa yang terjadi di realita yang menyatakan bahwa bantuan sosial sembako Covid-19 di Tanggulsari tidak tepat sasaran dan proses pendataan yang tidak demokratis sehingga menyebabkan ketimpangan yang berdampak buruk pada saat itu.

#### b. Sosialisasi Program

Kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program. Sehingga informasi terkait pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Lebih lanjut, peneliti

menanyakan tentang bagaimana sosialisasi program yang dilakukan selama proses pendataan oleh Ketua RW.

“ infonya ya saya share terus mbak, via grup whatsapp soalnya kan nggak bisa mengadakan pertemuan, jadi ya cuman dishare whatsapp aja, jadi dari kelurahan terus disampaikan ke warga” ( Wawancara, Yusuf, 30 Desember 2022).

Keterangan diatas menunjukkan bahwa proses sosialisasi bantuan sosial sembako sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu harus disampaikan ke warganya.

#### c. Tujuan Program

Tujuan program yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

#### d. Pemantauan program

Pemantauan program ialah kegiatan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Menurut Sri Wahyu Ningsih (2013), Efektivitas dapat didefenisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu :

1. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya
2. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
3. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
4. Menangani tantangan masa depan.

Ia juga menambahkan bahwa efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Didalam Pedoman Umum Raskin (2016) menjelaskan kaitan efektivitas dengan pengelolaan program Beras untuk keluarga miskin (Raskin), maka yang dimaksud dengan efektivitas disini adalah dengan mengukur indikator keberhasilan pelaksanaan program Raskin adalah tepat sasaran penerimaan manfaat, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan administri.

#### 1. Tepat sasaran

Dalam hal ini adalah penyaluran Sembako telah sampai kepada keluarga miskin yang telah terdaftar dalam daftar penerima beras bersubsidi

## 2. Tepat Jumlah

Tepat jumlah adalah jumlah dana yang diterima oleh keluarga miskin telah sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh pemerintah yang merupakan hak RTS - PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Rp.200.000/KPM.

## 3. Tepat harga

Harga Sembako yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan harga pasar yang telah ditentukan oleh agen e-Warong

## 4. Tepat waktu

Kesesuaian waktu penyaluran dana Sembako dan pelaksanaannya harus dilaksanakan setiap bulan, kecuali untuk beberapa wilayah tertentu yang sulit dijangkau *dropping* dilakukan dua bulan sekali atau tergantung situasi.

## 5. Tepat kualitas

Kualitas bahan pangan yang diberikan ke masyarakat harus bersih dan layak konsumsi serta mutunya terjamin.

## 6. Tepat Administrasi

Ketepatan prosedur pelaksanaan yang ditetapkan yaitu manajemen keuangan hasil dari setoran pembayaran penjualan Sembako harus secepatnya disetor setiap bulannya.

Dalam mengukur Efektivitas penyaluran Sembako terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan pencapaian program Raskin, diantaranya menurut Andrida dalam Metry (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Efektivitas Program Raskin dan Kepuasan Rumah Tangga Penerima Manfaat di DKI Jakarta*. Master Thesis, Institut Pertanian Bogor ada 5 faktor penentu efektivitas dalam pelaksanaan program Beras Bersubsidi antara lain:

### 1. Ketepatan komunikasi dan koordinasi

Faktor penting yang mendukung adanya pelaksanaan program yang efektif adalah dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, keberhasilan program mensyaratkan agar pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan. Untuk itu, perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif baik antara pelaksana program dengan kelompok sasaran.

### 2. Transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dalam suatu program bermakna membuka akses informasi kepada pemangku program yang harus mengetahui dan memahami kegiatan serta mampu

melakukan pengawasan secara mandiri. Sedangkan akuntabilitas bermakna setiap pengelolaan program beras harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku yang telah disepakati.

### 3. Sumber daya yang memadai

Sumber daya merupakan faktor penting dalam menyelenggarakan sebuah program. Dari keseluruhan sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan program Raskin sumber daya non-manusia yang paling penting yaitu beras bersubsidi atau beras miskin. Hal ini disebabkan beras merupakan produk utama dari program Raskin itu sendiri untuk mencapai tujuan dan sasarannya.

### 4. Sikap positif pelaksana

Pelaksanaan program juga membutuhkan dukungan sikap positif dari para pelaksana karena merekalah yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran. Sikap pelaksana meliputi kemampuan dan kemauan para pelaksana dalam menjalankan tugas-tugas tertentu untuk mencapai tujuan program.

### 5. Dukungan dan partisipasi kelompok sasaran

Dukungan kelompok sasaran adalah suatu sikap mendukung yang dimiliki oleh satu kesatuan unit manusia yang menjadi objek dari suatu tujuan tertentu.

## **C. Dampak Bantuan Sembako di Tanggulsari Mangunharjo**

Situasi dan kondisi yang serba susah karena dampak dari covid-19 menjadi dorongan sendiri bagi masyarakat agar dapat tetap melanjutkan kehidupan mereka sehari-hari. Maka dari itu, dengan adanya bantuan sosial sembako pada waktu itu keberadaannya sangatlah dibutuhkan dan krusial. Hal ini dijelaskan oleh salah satu warga Tanggulsari yang merupakan penerima bantuan sosial sembako covid-19.

“rata-rata waktu itu semua dilarang kan mbak, pokoknya yang menimbukan keramaian jadi suami saya yang sebagai nelayan akhirnya gak bisa melaut soalnya ya gak bisa dijual, ya menurunlah. Paling melaut kalo dapet ya buat makan sendiri, makanya pas dapet bansos sembako kemarin sangat terbantu karena ya memang butuh, walaupun kurang tapi disyukuri” (Wawancara, Sudarmi, 12 Agustus 2022)

Selain itu, tidak sedikit warga yang menjalani isolasi mandiri karena terinfeksi covid-19 saat itu, juga mendapatkan bantuan sosial sembako. hal ini diperkuat oleh penjelasan Muhamad Amir selaku Sekretaris Kelurahan.

“mereka yang terpapar dan sedang menjalani isolasi mandiri juga dapat disini cuman ya beberapa saja karena terbatas”. (Wawancara, Amir, 12 Agustus 2022)

Hal ini diperkuat kembali dengan konfirmasi seorang warga Tanggulsari yang saat itu sedang isolasi mandiri.

“iya saya dapat mbak, saya waktu itu lagi isoman sendiri jadi ikutan dapet dikasih sama mbak atik” (Wawancara, Muhamad Yunus, 12 Agustus 2022)

Melihat dari beberapa pelaksanaan distribusi bantuan sosial sembako yang dilakukan, pastilah selalu menjumpai masalah dengan realisasinya tak terkecuali di wilayah Tanggulsari Kelurahan Mnagunharjo Semarang. Hal ini dijelaskan oleh ibu Sugiharti selaku Lurah Kelurahan Mangunharjo yang menjelaskan tentang keefektifan distribusi bantuan sosial sembako covid- 19 saat itu.

“kayaknya mau sebagus dan sesempurna apapun rencana yang bakal dilakukan pasti belum efektif ya mbak, soalnya pasti ada aja masalahnya ya kayak banyak warga yang protes dateng ke kantor itu kan salah satu contoh dampak dari kurang efektifnya realisasi distribusi bansos” (Wawancara, Sugiharti, 11 April 2022)

Tidak hanya dari sudut pandang perangkat Kelurahan saja yang melihat hal tersebut, dari sudut pandang masyarakat juga menjelaskan kurang efektifnya distribusi bantuan sosial.

“sampai ada warga yang harusnya dapat api malah gak dapat, malah yang mampu-mampu pada dapat itu sudah kelihatan ya mbak” (Wawancara, Sofiatun, 12 Agustus 2022)

Dari beberapa jawaban hasil wawancara diatas, dapat diartikan bahwa sejak proses pendataan yang menjadi akar penyebab ketidakefektifan proses distribusi bantuan sosial yang pada akhirnya menimbulkan konflik-konflik baik antar masyarakat maupun masyarakat dengan perangkat kelurahan. Penting Ada interaksi antara politik dan masyarakat umum. Jenis politik yang akan menjadi suara rakyat, pimpinan rakyat harus mampu mengartikulasikan politik pragmatis. Politik dijalankan sesuai dengan aspirasi rakyat. Masyarakat umum juga menyampaikan aspirasi berdasarkan program-program yang berhasil. Bukan hanya satu saran per permintaan kompensasi. Pentingnya partisipasi politik aktif seluruh rakyat terbukti di sini. Masyarakat harus mampu menerima nasihat dari politisi atau pemerintah saat membahas kebijakan publik atau menyampaikan keprihatinan kepada masyarakat umum. Selain itu, kebijakan deliberatif yang krusial diimplementasikan melalui forum warga yang dijalankan secara demokratis di mana warga dapat belajar, berdiskusi, dan terlibat dalam debat. Dalam demokrasi, kebijakan deliberatif didefinisikan sebagai proses artikulasi keputusan kolektif. Namun, politik tidak hanya hadir pada kalangan atas, melainkan juga terjadi pada kalangan akar rumput yang turut melakukan perilaku politik. Pemerintah di era kelimpungan COVID-19 dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, baik pusat atau daerah (Ihsanuddin, 2020). Pemberian Bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah Terkesan Membingungkan, lambat diterima oleh masyarakat yang menerapkannya dan tidak tepat sasaran. Mungkinkah perselisihan kontrak sosial ini telah diselesaikan oleh pemerintah Indonesia atau karena hubungan Pemerintah yang buruk dengan penduduk dan sistem penyelesaian perselisihannya atau penggunaan berbagai pintu

dalam proses pemberian bantuannya? Banyaknya pintu bantuan sosial inilah yang menciptakan beragam perspektif dan narasi, dan seringkali data yang diberikan tidak akurat. Ada sejumlah artikel di jejaring sosial selama pandemi COVID-19 dan sebelum pandemi. Adanya perbedaan variabel dan hasil dari beberapa kajian tersebut, termasuk pemerintahan tumpang tindih terkait COVID-19 yang diperkenalkan, mengakibatkan kesulitan dan permasalahan selama pelaksanaan kajian tersebut (Saleha Mufida, 2020). Di sisi lain, masyarakat kerap mencontohkan gagasan kebijakan bantuan tunai (Joharudin, 2020). Hirawan (2020) menegaskan bahwa distribusi manfaat sosial kepada masyarakat tidak maksimal karena kegagalan pemerintah untuk bertindak dan kurangnya sistem untuk menyadarkan masyarakat miskin akan kebutuhan akan manfaat sosial (Santoso, 2019)

Selanjutnya peneliti menganalisis tentang pemantauan program yang dilakukan selama proses distribusi bantuan sosial sembako di Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang yang mana penelitian tersebut menghasilkan sejak memantau pelaksanaan program Bantuan Sosial Sembako, ada pembaruan yang diberikan, seperti di bawah ini:

“Jika ingin melihat progres pekerjaan yang sedang dikerjakan, prosesnya langsung minta saja surat penerima dari masing-masing RW di Mangunharjo.” (Wawancara, Amir, 11 April 2022)

Peneliti menanyakan terakhir kepada informan apakah pengumpulan data peserta program Bantuan Sosial Sembako dilakukan atau tidak selama proses pemantauan, jika demikian, apakah diungkapkan oleh informan selaku staf yang menangani program ini.

“Iya pihak kelurahan memverifikasi data orang yang menerima bansos sembako lewat ketua RW masing-masing”. (Wawancara, Syafaati Nurgiyanti, 11 April 2022)

#### **D. Problem Bantuan Sosial COVID-19 Di Tangulsari Kelurahan Mangunharjo**

Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penerapan hukum kontrak sosial bukanlah konsep baru. Namun kesulitan selalu muncul dalam penyampaian. Terlepas dari musibah bantuan sosial yang ada di masa Pandemi. Bantuan sosial tahap satu dari pemerintah kini bergerak menuju penyelesaian tahap kedua. Beberapa pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada Ombudsman dalam menanggapi bantuan bakti sosial tahap pertama antara lain sebagai berikut: diketahui bahwa sebagian warga Jakarta tidak puas dengan bantuan bakti sosial karena kurangnya rasa hormat terhadap pembawa bantuan. proses, sementara yang lain tidak mengetahui hak mereka untuk menerima bantuan dan mengindikasikan bahwa mereka melakukannya di Bali dan Padang. (Dewi, 2020)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persoalan bantuan sosial Pemerintah Pusat adalah bantuan penerima data. Data Penerima Bantuan Sosial harus dimutakhirkan dan diverifikasi setiap tahun agar jika terjadi bencana atau non-bencana, Pemerintah siap dengan manfaat jaminan sosial yang diperlukan. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 8 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyebutkan



bahwa Laki-laki wajib melakukan langkah-langkah pendahuluan dalam kriteria fakir miskin. Setelah itu, Perdana Menteri melakukan proses verifikasi dan validasi data fakir miskin yang dilakukan minimal dua tahun sekali. Hasil verifikasi dan validasi pendataan kemudian dilaporkan kepada Bupati atau Walikota. Bupati/Walikota kemudian memohon gubernur untuk berbicara dengan perdana menteri. Sebaliknya, seorang miskin fakir yang belum tercatat dapat memberikan pemberitahuan kepada Lurah atau Kepala Desa. Jika ada perubahan data salah satu anggota kelompok yang terdaftar sebagai fakir orang miskin, maka harus menghubungi Lurah atau Kepala Desa. Data tersebut tidak hanya akan diverifikasi dan divalidasi kembali oleh Bupati/Walikota sebelum disampaikan kepada Menteri. Jelas bahwa masalah dengan situs jejaring sosial bukan hanya masalah data. Menurut laporan yang diterbitkan (Khadafi, 2020), Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Pendidikan, menyatakan dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Kamis, 19 Mei 2020, ada tiga masalah dengan kontrak sosial:

1. Setiap campuran alokasi anggaran Kementerian itu unik. Terdapat masalah alokasi anggaran di Kementerian Desa & Transmigrasi, namun tidak ada masalah anggaran di Kementerian Sosial. Menurut data terbaru, 21.797 desa tidak mendapatkan satu pun dari 53.156 desa atau 70,9% dari pendapatan tahunan desa. Dari 53.156 desa yang telah ditetapkan sebagai BLT bagi kelompok masyarakat yang mampu, tersisa sekitar 12.829 desa atau sekitar 17 persen.
2. Untuk memastikan bahwa data akurat dan lengkap sehingga penyampaiannya seaman mungkin, perlu menggunakan data dengan hati-hati.
3. Masalah sistemnya, data yang sudah dikirimkan oleh RT atau RW terlebih dahulu harus ada verifikasi dari Pemerintah Kabupaten atau Kota sebelum digunakan sebagai data jejaring sosial. Dengan menggunakan prosedur verifikasi untuk penyalurasi cepat, situasi ini telah dibuat menguntungkan. Pemerintah Daerah juga mengalami beberapa kesulitan dengan bantuan sosial, baik itu bantuan yang berupa bantuan yang bukan bantuan tuna. Permasalahan utama dalam penyaluran bantuan sosial di daerah sebagaimana tersebut di atas adalah penerima data yang ganda, yang disebabkan oleh data yang sudah usang sehingga harus segera dimutakhirkan. Untuk itu, pendataan hewan peliharaan setiap negara harus memahami pentingnya dan pengetahuan yang diperlukan tentang kontrak sosial, apakah dengan tuna atau tanpa tuna..

Ada beberapa kendala lagi yang ada di Tanggulsari Mangunharjo, antara lain:

1. Data penerima bantuan sosial yang masih tumpang tindih dengan penerima bantuan lainnya, seperti penerima data Bansos Tunai, yang namanya juga tercantum dalam program BLT atau program bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai.
2. Data yang digunakan dalam DTKS diperoleh dari kewilayahan dengan menggunakan RT/RW. Namun, ada kemungkinan RT/RW ingin menyampaikan data baru yang terkait dengan warga yang ekonominya terdampak COVID-19, dan mereka yang terkena dampak tersebut belum melaporkan datanya ke RT/RW.

3. Masalah data yang terus-menerus mempengaruhi masyarakat umum adalah kemungkinan bahwa masyarakat umum akan mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada mereka dan lingkungan terdekat mereka. Misalnya, jika penerima bantuan setahun yang lalu, tetapi sekarang waktu telah berlalu, mungkin telah terjadi pergeseran atau perubahan ekonomi dari satu kelompok ke kelompok lain. Namun, mungkin tidak melaporkan perubahan data tersebut kepada RT/RW atau pihak lain yang sesuai. Alhasil, mungkin saat ini warga yang harus menerima bantuan, berbeda dengan warga yang menjadi penerima bantuan setahun yang lalu, tetapi situasi inilah yang menjadi hambatan dalam pendataan yang masih tergolong rancu.
4. Selain itu, masih ada pemahaman yang sangat kurang di kalangan masyarakat umum mengenai kriteria bantuan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mencakup berbagai kategori. Akibatnya, masyarakat umum sering mempertanyakan mengapa mereka dan rekan mereka menerima jumlah atau jenis pembayaran yang berbeda padahal mereka sebenarnya memiliki permasalahan yang sama. Untuk mencegah timbulnya masalah-masalah psikologis yang terkait dengan penyampaian kontrak sosial, perlu diberikan informasi yang lengkap, jelas, dan lebih luas kepada seluruh masyarakat tentang jenis dan kriteria kontrak sosial.
5. Tidak adanya kejelasan dari pihak Ketua RW maupun RT mengenai data valid warganya yang sekiranya masih terdampak atau ekonominya sudah membaik.

Untuk mengatasi setiap kendala dan bahaya yang muncul di sini, sangat diperlukan kerjasama, koordinasi, dan keharmonisan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kewilayahan, dan RT/RW, yang sangat penting untuk pembuatan kebijakan sosial. Berbagai program sosial yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah antara lain Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bansos Sembako Jabodetabek, Bansos Sosial Tunai, Pembebasan Biaya Listrik, Kartu Prakerja, Penambahan Peserta Program Keluarga Harapan, dan Kart (Program Reguler). Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 No. 11 Tahun 2019.

Penerima bansos sembako adalah para masyarakat yang terkena dampak langsung dari Covid-19 di wilayah RT/RW. Namun, mereka tidak berhak menerima bansos jika masih terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial, Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Prakerja, atau anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Bantuan yang dimulai selama tiga bulan, dimulai pada bulan April dan berakhir pada bulan Juni, ada dua cara untuk melakukan proses penerimaan bansos yaitu bagi mereka yang memiliki rekening bank, uang akan ditransfer ke rekening mereka. Selain itu, uang akan didistribusikan secara door-to-door kepada calon penerima yang tidak memiliki rekening bank. Dapat disimpulkan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama pelaksanaan program bantuan sembako yang telah diusahakan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah untuk diselesaikan sesuai dengan pelaksanaan UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berkaitan dalam rangka membantu segregasi masyarakat yang mengalami gejala pandemi COVID-19, Pemerintah telah mempertimbangkan berbagai program dan melaksanakannya. Namun dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan tidak ideal, sehingga inefisiensi ini tidak serta merta menimbulkan masalah lain yang lebih signifikan.

Menurut Mufida (2020), “Banyak regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang tidak selaras dan sejalan dengan menimbulkan problematika baru di tengah masyarakat yang panik akibat wabah covid 19 ini,” banyak peraturan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Masyarakat diwajibkan dan harus taat kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sinkron antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, kesepakatan yang dicapai antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus sepaham dan saling mendukung satu sama lain untuk mencegah keresahan masyarakat dan maraknya protes. Kekisruhan dalam proses ikatan sosial dapat diselesaikan hanya dengan saling peduli dan sadar akan keadaan masing-masing yang nantinya tidak menimbulkan perspektif yang berbeda dan tidak sama yang berujung pada konflik antar masyarakat.

Terlepas dari itu, ada beberapa langkah yang mungkin dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelaksanaan pendistribusian yang nondemokratis pada saat pandemi COVID-19. Yaitu, pemerintah terus memperluas mekanisme pelaporan mandiri bagi mereka yang membutuhkan dana, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga pemerintah lainnya, terutama perusahaan baru yang menyediakan sumber daya untuk kelompok orang yang membayar sewa. Kedua, sisi suplai seperti produksi pangan dalam negeri harus diperhatikan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Ketiga, izin pencabutan bansos harus diberikan sesuai dengan situasi saat ini. Bantuan sosial diubah menjadi nonkonvensional ketika diperlukan. Keempat, penting untuk memiliki komunikasi publik yang jelas dan teratur untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui bantuan yang akan diberikan dan mekanismenya. Sebagai pelaksanaan program sosial diawasi oleh Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Anak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Pemerintah Daerah, kerjasama antara Kementerian dan Lembaga (K/L ) sangat dibutuhkan. Terlepas dari kenyataan bahwa tuntutan sosial dan politik telah diterima, kriteria keberhasilan program berpusat pada kolaborasi, kerja tim, dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan serta antara elemen masyarakat.

## **BAB V**

### **AKTOR DAN KEPENTINGANNYA DALAM MENENTUKAN POLA DISTRIBUSI BANSOS SEMBAKO DI TANGGULSARI**

#### **A. Peran RT/ RW/ Yang Menyalurkan Bantuan Sosial**

Di kelurahan Mangunharjo, sistem pendistribusian yang diterapkan melalui pendataan oleh Ketua RT atau RW setempat yang dirasa lebih mengetahui kondisi warganya masing-masing. Peran ketua RT dan RW sangat berperan dan berpengaruh dalam hal ini, seluruh data yang dilakukan oleh ketua RT maupun RW semuanya dilakukan sendiri oleh para ketua.

”seluruh pendataan dilakukan sendiri oleh para ketua RT, lalu mereka menyetorkan nama-nama calon penerima bantuan sembako ke Kantor kelurahan kemudian kami yang akan menginput ke sistem untuk selanjutnya didata kembali oleh pemkot Semarang”. (Wawancara, Amir, 11 April 2022)

Namun, dalam realisasinya terdapat banyak sekali masalah yang timbul dikarenakan data yang diperoleh selalu tidak benar. Amir menjelaskan bahwa seringkali pihak kelurahan menghadapi keluhan-keluhan oleh masyarakat yang datang ke kantor kelurahan. Keluhan-keluhan tersebut diantaranya seperti kenapa bantuan sosial sembako dibagikan tidak merata, tidak tepat sasaran, bahkan ada yang tidak mengetahui kalau ada bantuan sosial.

Ketika wawancara dengan Amir selaku Sekretaris Kelurahan Mangunharjo, bahwa sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial sembako covid tahun 2021 sepenuhnya didata sendiri oleh RT dan RW terkait.

“ Kan ketua RT yang mengetahui keadaan para warganya, gimana perekonomiannya, gimana kondisinya baik kondisi rumah, orangnya dan lain-lain kan memang RT yang tahu jadi ya sepenuhnya RT yang mendata. Sistem pendataannya pun juga berbeda tiap RT, ada yang didata mandiri oleh RT yang menurutnya berhak dapat bansos, ada yang RT nya share list ke grup Whatsapp siapa yang mau dapat bansos, ada yang dikumpulkan ke rumah RT nya untuk dimusyawarahkan bersama tapi ya hanya beberapa orang saja karena kan waktu itu kondisinya tidak memungkinkan untuk kumpul-kumpul ya”. (Wawancara .Amir, 12 Agustus 2022)

Penjelasan diatas sudah jelas terlihat bahwa sepenuhnya pendataan penerima bantuan sosial sembako covid-19 memang dilakukan oleh ketua RT yang bersangkutan. Di RW 05 yang merupakan kampung nelayan wilayah Mangunharjo yang terdiri dari 3 RT menggunakan sistem pendataan yang dilakukan sendiri oleh ketua RT masing-masing.

Maka hal ini rentan akan terjadinya praktik politik distributif dimana dalam realitanya ketua RT melakukan pendataan yang tidak sesuai dengan keadaan dan kondisiarganya sehingga terjadilah distribusi bantuan sosial yang salah sasaran.

## **B. Seberapa Penting Peranan RT/RW Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Covid-19**

Proses distribusi bantuan sosial merupakan bagian yang sangat krusial. Maka dari itu, diperlukan data yang akurat untuk mendukung keberlangsungan dalam proses distribusi sehingga dalam penyaluran tidak terjadi hal seperti salah sasaran. Di wilayah Tanggulsari tepatnya di wilayah RW 05, proses distribusi bantuan sosial sembako ditangani oleh ketua RT yang mana merupakan aktor akar rumput dalam hal ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketua RT melakukan pendataan langsung kearganya. Cara atau metode pendataannya pun juga tiap RT berbeda-beda, hal ini dijelaskan langsung oleh salah satu staf kelurahan Mangunharjo bagian Kesos Ibu Atik dalam wawancara langsung.

“ Tiap wilayah itu beda-beda mbak, kayak contohnya di RW 01 itu ketua RT nya kayak ngumpulinarganya untuk nanti di diskusikan bersama siapa saja nanti yang dapat bantuan, terus di RW 02 itu sistemnya juga beda, setahu saya kayak para ketua Rtnya itu engga ngumpulin secara langsung tapi dishare infonya ke grup whatsapp terus diipersilahkan bagiarganya yang mau mengajukan diri atau menyarankan calon penerima, nah kalo yang di RW 05 di Tanggulsari setahu saya ya kayak ketua RT nya melakukan pendataan mandiri terus langsung di setor ke RW terus ke kelurahan, mbak itu setahu saya saya seperti itu ya”. (Wawancara, Istirokah, 11 April 2022)

Sebagaimana penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa sistem atau metode yang digunakan oleh para aktor akar rumput tiap wilayah berbeda-beda. Ada yang menggunakan cara yang demokratis baik secara langsung maupun tidak langsung (via whatsapp) dan cara non demokratis dengan melakukan pendataan mandiri oleh ketua RT nya. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan sekretaris kelurahan Muhamad Amir yang menjelaskan bahwa dengan menggunakan cara apapun dalam pendataan, aksi protes warga kepada pihak kelurahan tetap tidak bisa dihindari.

“Halah mbak, tetap aja pasti itu ada yang datang kesini buat protes, jadi walaupun sudah sudah pake cara se demokratis mungkin dirasa tetep aja gak bisa menghindari konflik kayak gitu. Soale ya gimana ya mbak. Kan semua masih susah waktu itu jadinya ya pinginnya dapat semua tapi kan gak bisa orang dari pemkot juga dibatasi jumlahnya”. (Wawancara, Muhamad Amir, 11 April 2022)

Rentang kendali pintu antara pemerintah pusat dengan masyarakat masih terlalu jauh. Seharunya pemerintah daerah yang terdekat dari masyarakat diberi kewenangan kendali jangan langsung dari kementerian kepada penduduk, karena itu berbeda dampaknya, seperti yang di desa ada yang dapat dana desa, dan ada yang dapat dana

kemensos, padahal hal tersebut berbeda. Karenanya kepala desa menjadi bingung membagikannya, apakah si A dapat dana Kemensos ataukah si A dapat dana desa, karena pilihannya sangat banyak. Data yang diberikan pun tidak valid, seperti data warga yang sudah meninggal, tetapi masih terdaftar mendapatkan bantuan sosial. Selain itu juga ada warga yang sudah pindah rumah, tetapi KTP masih menggunakan alamat yang lama. Karena itu, Kemensos menggunakan data lama, sehingga tidak tepat sasaran kepada warga yang terdampak covid-19. Selain itu adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat setempat yang semula mendapatkan bantuan sosial 250.000 per kepala keluarga dipotong 25.000 menjadi 225.000 perkepala keluarga. Banyaknya regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak harmonis dan sejalan dengan masyarakat menimbulkan problematika baru di tengah masyarakat yang panik akibat wabah covid 19 ini. Masyarakat diwajibkan dan harus taat kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga membuat masyarakat menjadi bingung harus bertindak. Seharusnya kebijakan yang dikeluarkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus satu pintu dan saling sinkron antara satu sama dengan yang lain, agar masyarakat tidak bingung dan tidak banyak menuai protes. Menurut Bapak Amir yang waktu itu menangani masalah protes warga yang datang ke kantor kelurahan juga menjelaskan bahwa kekisruhan tersebut dapat diselesaikan apabila prosesnya hanya melewati satu pintu dan satu waktu. Selama tidak satu pintu dan tidak satu waktu maka mengakibatkan perspektif yang berbeda dan tidak sama (Mufida, 2020)

” Masalahnya, kita sekarang ini sedang mengalami emergency dimana tidak semua orang bersikap sabar. Banyak orang meluapkan amarah emosinya, akhirnya akan menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat” (Wawancara, Muhamad Amir, 11 April 2022.)

Peranan aktor akar rumput yang mana dalam hal ini memegang peranan penting, sebagaimana dijelaskan dijelaskan oleh salah satu warga Tanggulsari Bpk. Purwanto dalam wawancara langsung yang menjelaskan bahwa ketua RT memiliki pengaruh dan peranan penting dalam distribusi bantuan sosial covid-19 sembako.

“ kan pak Yusuf yang ndata ya mbak, di wilayah sini RT 02 jadi ya saya sendiri juga gak tau dasarnya kaya gimana kalo data orang warganya sendiri untuk dapat bantuan sosial aja gak paham, kalo saya pribadi sih gak dapat bansos covid yang sembako mbak soale ya masih bisa buat mencukupi kebutuhan sehari hari, ya yang masalah itu dah jadi rahasia umum mbak disini, kita sebagai warga biasa ya sebenarnya dah terserah”. (Wawancara, Erik Prasteyo, 12 Agustus 2022).

### **C. Faktor Yang Melatar Belakangi Praktik Politik Distributif Bantuan Sosial Sembako Covid-19**

Praktik politik distributif tidak hanya terjadi pada saat momen-momen pada pemilu saja, dalam berbagai hal dapat dijumpai praktik politik distributif tak terkecuali seperti pada momen bantuan sosial. Pada pembahasan kali ini berupa bantuan sosial sembako. pada masa pandemi covid-19 tahun 2021 program bantuan sosial memang sangatlah diutamakan guna membantu menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam praktiknya, bansos-bansos yang didistribusikan melalui perantara memang sangat rentan akan terjadinya praktik politik distributif. Di wilayah Mangunharjo khususnya di Tanggulsari hal-hal seperti ini dapat dijumpai pada tiap-tiap RT dan RW masing-masing sebagaimana dijelaskan oleh staf kelurahan Rifan Yahya dalam wawancara langsung.

“Wah, disini pak RT RW nya memang unik mbak, ya mereka merasa bahwa merka yang ndata, terus mereka berikir yo aku kudu oleh walaupun mereka mampu. Soale kan nek situasi kayak gitu kan semua susah to mbak, dadine yo moh rugi, kudu ono imbalane”. (Rifan Yahya, Wawancara, 12 Agustus 2022)

Keterangan diatas sangat jelas bahwa praktik politik distributif memang terjadi selama program bantuan sosial covid-19 ini turun. Hal ini dikarenakan keadaan yang saat itu sedang sulit sehingga memaksa mereka para aktor atau pelaku politik distributif akar rumput melakukan hal menyimpang tersebut yang memang prosesnya melalui perantara RT dan RW. Selain itu, ada beberapa alasan yang melatar belakangi para pelaku melakukan hal seperti ini, diantaranya seperti karena adanya dorongan dari kerabat-kerabat, warga favorit, dan faktor lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rifan kembali saat wawancara langsung.

“Di RW.. itu mbak, pak RW nya punya geng ada sekitar tiga orang warga lah. Nah itu setiap ada bantuan sosial turun terus yang ndata RW nya sudah pasti tiga warga favoritnya itu pasti diikuti, pasti itu, cuman saya tidak berhak kasih tau karena bukan ranah saya” (Wawancara, Rifan Yahya, 12 Agustus 2022)

Keterangan diatas menunjukkan dengan jelas bahwa salah satu faktor yang membuat pelaku atau aktor akar rumput melakukan praktik politik distributif itu karena didasari oleh kekerabatan yang akhirnya memunculkan politik kekerabatan bantuan sosial. Dalam wawancara dengan beberapa warga Mangunharjo yang mengetahui hal ini, dijelaskan bahwa “warga favorit” ini sebenarnya tidak layak menerima bantuan sosial sembako pada masa covid-19 tahun lalu.

“ Haruse sih gak dapet ya mbak, ya soalnya kan walaupun mereka ekonominya agak kurang, tapi kan dari dulu sebelum covid keadaane sudah begitu, jadi ya tidak termasuk warga terdampak wabah covid mbak, kaya pak Solehah itu dari dulu memang tukang kayu rumahan nggak kerja, kerjanya ya kalo ada orderan. Terus, Pak Jumiatun itu ya dari dulu nganggur kerjanya serabutan aja, terus pak

Hadiyatno itu kan pengumpul rosok, jadi ya dari dulu kerjane emang ngumpulin rosok aja, kayak gitu keadaan sama sekali gak terdampak covid eh malah dapet kan agak wagu mbak. Justru ada beberapa warga yang terdampak kayak pak Rudi itu di PHK dari pabriknya karena bangkrut terus bu Ngatijah yang usahanya bangkrut juga soale kan dia jualan jajanan di sekolah SD terus pas covid kan sekolah dirumahkan otomatis kan bu Ngatijah gak jualan akhire yo bangkrut kayak gitu-gitu malah gak dapet bansos padahal ya mereka butuh” (Wawancara, Sudarmi, 12 Agustus 2022)

Keterangan yang diberikan oleh salah satu warga Tanggulsari tersebut menunjukkan bahwa “warga favorit” dari ketua RW 05 yaitu Yusuf Bahtiar (aktor) sangat berperan penting. Tentunya, para “warga favorit” dari Yusuf ini seharusnya sudah tidak mendapat bantuan sosial lagi karena memang mereka tidak terdampak covid-19 secara langsung. Pada beberapa kasus warga yang datang ke kelurahan untuk melakukan protes mengenai distribusi yang salah sasaran ini, tidak jarang para staf Kelurahan Mangunharjo kebingungan dalam menyikapi karena memang sepenuhnya yang melakukan pendataan adalah para ketua RT masing-masing. Maka, hal yang hanya bisa dilakukan oleh staf kelurahan adalah berusaha meleraikan atau meredakan emosi warga saja tanpa dapat memberikan solusi, hal ini dijelaskan dalam wawancara langsung oleh sekretaris kelurahan Bapak Amir.

“kita kan gak tau keadaan masing-masing, kayak apa, gimananya kan ndak tau jadi ya pendataan dilakukan pyur murni dari bawah ke atas yaitu dari RT terus datanya di setor ke kelurahan untuk nanti kita setor ke pemerintah kota. Kalo kasus salah sasaran itu banyak mbak, yang protes juga banyak pada dateng kesini, upaya yang kita lakukan saat itu ya hanya ngasih kata-kata penenang biar gak pada emosi aja, sambil kita nunggu, solusi dari masalah ini enaknya gimana jalan keluarnya, kan ya saya gak bisa mutusi sendiri wong yang ngasih bantuan pemerintah”. (Wawancara, Amir, 12 Agustus 2022)

Pihak kelurahan yang telah mengupayakan masalah seperti ini hanya bisa mengadakan ke website terkait tentang masalah dan kendala yang dihadapi saat distribusi maupun pendataan. Keterangan selanjutnya adalah mengenai jalan keluar yang dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Amir.

“akhirnya kan kita ngakal sendiri mbak, soalnya dari pemerintah juga gak segera ngasih saran enaknya gimana, akhirnya diakal dengan cara gantian mbak, jadi kalo bulan ini misal pak A udah dapet ya periode selanjute gak dapet kalo kalo gak ya ya dibagi separo-separo gitu tapi pada gak mau soale katane nanggung”. (Wawancara, Amir, 12 Agustus 2022)

Keterangan diatas menjelaskan bahwa pihak kelurahan yang telah mengupayakan agar masalah salah sasaran dan masalah pendataan tersebut teratasi, akhirnya berputar otak untuk menentukan bahwa bantuan sosial sembako akan dilakukan secara bergantian penerimanya, sembari menunggu perubahan data lagi pihak kelurahan hanya dapat melakukan hal tersebut.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Politik Distributif Bantuan Sosial Sembako Di Akar Rumput Pada Masa Pandemi Covid-19 wilayah Tanggulsari Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Bantuan Sosial salah satunya adalah bantuan sosial berupa sembako. Untuk melihat indikator tercapainya dari program bantuan sosial tersebut dapat diukur melalui efektivitas pelaksanaan program Bantuan Sosial. Efektivitas tersebut dapat dinilai dengan melihat bagaimana proses dan pola distribusi yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan prosedur. Dalam prosesnya, terdapat dua jenis distribusi yaitu distribusi programatik dan non- distribusi programatik yang menghasilkan pendataan dilakukan dari bawah ke atas.
2. Proses distribusi bantuan sosial sembako akibat dari adanya wabah covid-19 tahun 2021 di wilayah Tanggulsari Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang dipenuhi dengan praktik politik distributif yang dilakukan oleh para aktor akar rumput yaitu warga Tanggulsari, Perangkat Kelurahan dan Ketua RW (Rukun Warga) yang diawali dengan proses pendataan yang dilakukan secara sepihak, tidak transparan dan tidak demokratis oleh aktor sehingga bantuan sosial sembako menjadi salah sasaran. Adapun faktor yang mempengaruhi salah satu aktor akar rumput melakukan hal tersebut karena adanya dorongan dari kerabat dekat dan “warga favorit” dari Ketua RW.

#### **B. Saran-saran**

1. Perlu adanya pendampingan dalam proses pendataan oleh perangkat kelurahan tiap RT agar meminimalisir terjadinya politisasi bantuan sosial
2. Lebih ditingkatkannya lagi koordinasi antara warga, Ketua RW, Ketua RT dan perangkat kelurahan terutama terkait dengan tipe penerima bantuan sosial
3. Membangun kesadaran masing-masing warga akan keadaan sehari-hari

4. Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) seperti pengelolaan UMKM wilayah untuk membantu perekonomian setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Siti Nur, 2021 "*Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Ekonomi*", dalam katadata.co.id <https://katadata.co.id/safrezi/berita/62130e3d98f90/pandemi-covid-19-dan-dampaknya-terhadap-ekonomi>, diakses pada 21 Mei 2022
- Aco, Hasanudin. 2021. "*Ini 9 Bantuan dari Pemerintah Selama Pandemi Covid-19: Ada PKH, BST hingga Bantuan Pulsa*", dalam Tribunnews.com <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/22/ini-9-bantuan-dari-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-ada-pkh-bst-hingga-bantuan-pulsa>, diakses pada 12 April 2022).
- Admin 2022a, "*Layanan Informasi Covid-19 Kota Semarang*", dalam <https://ppid.semarangkota.go.id/daftar-informasi/> diakses 10 April 2022.
- Admin 2022b, "*Kebijakan Pengadaan Program Bantuan Sosial bagi UMKM Terdampak Covid-19 di Kota Semarang*", dalam <https://pattiro-semarang.org/tag/umkm-kota-semarang>, diakses 10 April 2022.
- Admin 2022, *Dinas Sosial Provinsi Jateng*. dalam <https://dinsos.jatengprov.go.id/ppid/informasi-serta-merta/dinas-sosial-prov-jateng>
- Asmuni, "*Gotong Royong Saat Pandemi: Ketepatan Bantuan Sosial Bagi Terdampak*", dalam Pelita Ilmu, Vol. 3, No. 1, 2020
- Avriliyanti, "*Dampak Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Paduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*", Dalam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015
- Ayu, S. S, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Sembako Studi Kasus Pada Rumah Tangga Kurang Mampu Di Desa Karassing, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba*", Skripsi, 7-8, 2021
- Bangsawan, S, "*Pemasaran Usaha Kecil*", ISBN:978-602-262-581-6, Edisi Pertama: Yogyakarta Giraha Ilmu, 2015
- Basir, M, "*Penyimpangan Keuangan Daerah Pada Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Pemerintah Sulawesi Selatan Tahun 2008*", dalam *Journal Of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 8, 2021.
- Creswell, J, "*Penelitian Kualitatif dan Design Riset*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

- Dewi, R. S, " *Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tahap Satu, Covid-19*", Ombudsman, 2020
- Furchan, A, " *Penelitian Dalam Pendidikan*", (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Ginkel, R. V, " *Coastal Cultures: An Anthropology of fishing and whaling tradition*", Apeldoorn: Het Spinhuis Publisher, 2007
- Gitiyarko, Vincentius. 2021. " *PSBB hingga PPKM, Kebijakan Pemerintah Menekan Laju Penularan Covid-19*", dalam <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/psbb-hingga-ppkm-kebijakan-pemerintah-menekan-laju-penularan-covid-19>., diakses pada 12 April 2022).
- Hallim, W, " *Program Dana Hibah Dalam Perspektif Politik Distributif: Studi Kasus Prodama Kota Kediri*", dalam Universitas Brawijaya, Vol. 2, No.1, 2019.
- Ihsanuddin, " *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*", dalam Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta>, 2020
- Joharudin, A. S. " *Panic Syndrom Covid-19: Penekanan Terhadap Kebijakan Yang Diberikan*", *Jurnal Perspektif* 4(1), 44-53, 2020
- Khadafi, M, " *Penyaluran Bansos Lambat, Begini Penjelasan Pemerintah*", Jakarta: Bisnis.com, 2020
- Kusnadi, " *Keberdayaan Nelayan Dan Dinamika Ekonomi Pesisir*", Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009 h 83
- Morado, R, " *Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 Di Dki Jakarta*", dalam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol. 3, No. 2, 2021
- Milles dan Huberman, " *Analisis Data Kualitatif*", Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.
- Mufida, A, " *Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid-19*", 6-7, 2020
- Mulyana, D, " *Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010)
- N. R Yunus, R. A, " *Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Covid-19*" dalam Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 1, 2020
- Nulhaqim, K. F, " *Analisis Konflik Distribusi Bantuan Sosial Covid-19 Dan Strategi Penyelesaian Konflik Di Kota Bandung*" dalam Universitas Padjajaran, Vol. 3 No. 1, 2020

- Nurhayati, N, "*Analisis Yuridis Konsep Negara Kesejahteraan: Penyimpangan Dana Bansos Di Tengah Pandemi Covid-19*", dalam Res Judicata, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Nuswardani, T. A, "*Analisis Perkara Penyimpangan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Ke Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah*", dalam Malang: Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 2, 2014.
- Pascarina, C, "*Korupsi Politik dalam Kompetisi Elektoral*", dalam Jurnal Academia, Vol. 37, No. 3, 2018
- Ramadhan, Jimmy Daniel Berlianto, "*Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal*", dalam Jurnal Antikorupsi Integritas, 2015
- Sajian, A, "*Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (Bst) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19 Di Kota Mataram Tahun 2020*", dalam Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021
- Saleha Mufida, d. (Vol. 1 No. 2 Oktober, 2020), "*Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi*", *Independen Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, dalam *Independen Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 2020
- Santoso, S. M, "*Sosial Untuk Keluarga Miskin Dengan Metode Simple Additive Weighting (Saw)*", 4307, 21-28, 2019
- Shofi, M, "*Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Ri Di Masa Covid – 19 (Studi Kasus Rw.001 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat)*", dalam Universitas Sumatera Utara, 2021
- Sjafrina, P, "*Patronase Dalam Pencalonan Kepala Daerah (Studi Kasus Patronase Pencalonan RA. Imam-Din Zein Dalam Pilkada Bangkalan)*", 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Sumarto, M. *Perlindungan Sosial Dan Klientelisme Makna Politik Bantuan Sosial Tunai dalam Pemilihan Umum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014)
- Susanto, I. (diakses 27 Agustus 2022) *Kementrian Sosial Republik Indonesia*, dalam <https://kemensos.go.id/pedoman-umum-program-sembako-2020>
- Stokes, Thad Dunning, Marcelo Nazareno, Valeria Brusco, *Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distribution Politics*, (Inggris: Cambridge University Press, 2013)

- Wardani, A, "*Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*", dalam Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 2014.
- Wahyuni, D, "*Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Masa Ppkm*", dalam Badan Keahlian DPR RI, Vol. 8, No. 15, 2021.
- Wijaya, F. N, "*Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Dikabupaten Ponorogo Tahun 2020*", dalam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Wawancara dengan Bapak Muhamad Amir ( Mantan Kasi Kesos tahun 2021 dan Sekretaris Kelurahan Mangunharjo Semarang). [ 11 April 2022 dan 12 Agustus 2022]
- Wawancara dengan Bapak Rifan Yahya (Staff Kelurahan Mangunharjo). [12 Agustus 2022]
- Wawancara dengan Ibu Syafa'ati Nurgiyanti (Staff Kesos Kelurahan Mangunharjo tahun 2021). [11 April 2022]
- Wawancara dengan Ibu Sugiharti ( Kepala Kelurahan Mangunharjo tahun 2021). [ 11 April 2022]
- Wawancara dengan Ibu Istirokah ( Warga RW 05 Tanggulsari). [12 Agustus 2022]
- Wawancara dengan Bapak Erik Prasetyo (Warga RW 05 Tanggulsari). [12 Agustus 2022]
- Wawancara dengan Ibu Sudarmi (Warga RW 05 Tanggulsari). [ 12 Agustus 2022]
- Wawancara dengan Bapak Muhamad Yunus (Warga RW 05 Tanggulsari). [12 Agustus 2022]
- Wawancara dengan Ibu Sofiatun (Warga RW 05 Tanggulsari). [12 Agustus 2022]
- Wawancara dengan Bapak Yusuf Bahtiar (Ketua RW 05 Tanggulsari). [ 12 Agustus 2022]



Lampiran 2. Wawancara dengan warga RW 05 Tanggulsari Semarang





Lampiran 3. Dokumentasi Distribusi Bantuan Sosial Sembako tahun 2021



Lampiran 4. Data Penerima Bantuan Sosial Sembako Tanggulsari Kelurahan  
Mangunharjo

NO	NO KK	NIK	NAMA	ALAMAT	RT	RW	KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	3374163101180001	3324085605750001	MISROTUN	MANGUNHARJO	2	5	MANGUNHARJO	TUGU	
2	3374160705120001	3374161005650001	SUGIYANTO	MANGUNHARJO	1	5	MANGUNHARJO	TUGU	
3	3374162301110001	3374160711820001	WIDIYANTO	MANGUNHARJO	1	5	MANGUNHARJO	TUGU	
4	3374161212050796	33741515106770001	Yuni murwaenah	Mangunharjo RT:3 RW:5 Kelurahan:Mangunharjo Kecamatan:Tugu	3	5	Mangunharjo	Tugu	
5	3374161901160006	337401511900004	Putri Dewi Lakhiqoh	Mangunharjo RT:3 RW:5 Kelurahan:Mangunharjo Kecamatan:Tugu	3	5	Mangunharjo	Tugu	
6	3374162501110006	3374160812870002	Muhammad Faridin	Karangayam RT:3 RW:5 Kelurahan:Mangunharjo Kecamatan:Tugu	3	5	Mangunharjo	Tugu	
7	3374162701110013	3374160508890001	Shona Nur Hasan	Mangunharjo RT:2 RW:5 Kelurahan:Mangunharjo Kecamatan:Tugu	2	5	Mangunharjo	Tugu	
8	3374161212052901	3374164602640001	Nawarti	Gotong Royong Mangunharjo RT:1 RW:5 Kelurahan:Mangunharjo Kecamatan:Tugu	1	5	Mangunharjo	Tugu	
9	3374161212052901	3374164207780002	Lasemi	Gotong Royong Mangunharjo RT:1 RW:5 Kelurahan:Mangunharjo Kecamatan:Tugu	1	5	Mangunharjo	Tugu	
10	3374161212052901	3374162701620001	Wahyu Tri Jatmiko	Gotong Royong Mangunharjo RT:1 RW:5 Kelurahan:Mangunharjo Kecamatan:Tugu	1	5	Mangunharjo	Tugu	
11	3374161603160004	3324141002910003	Mukhamad Andrik Saefudin	Mangunharjo RT:3 RW:5 Kelurahan:Mangunharjo Kecamatan:Tugu	3	5	Mangunharjo	Tugu	

12	3374160811180003	3401121608810001	Agustinus Purwadi	Perum Mutiara Mangkang No. 66 RT:2 RW:5 Kelurahan:Mangunharjo Kecamatan:Tugu	2	5	Mangunharjo	Tugu	
13	3374161212053146	3374166808550001	Supartinah	mangunharjo rt 3 rw 5	3	5	Mangunharjo	Tugu	lab di colombia asia
14	3374161212053146	3374160503530001	Hadiyatno	mangunharjo rt 3 rw 3	3	5	Mangunharjo	Tugu	lab di colombia asia
15	3374161212053348	3374160211950001	Mustofa	Mangunharjo RT:3 RW:2 Kelurahan:Mangunharjo Kecamatan:Tugu	3	5	Mangunharjo	Tugu	swab di perusahaan
16	3374162410070001	3374166505840002	Jumiatusun	Mangunharjo RT:3 RW:5 Kelurahan:Mangunharjo Kecamatan:Tugu	3	5	Mangunharjo	Tugu	swab di perusahaan
17	3374161603160004	3374165010920001	Octaviana Sari	Mangunharjo RT:3 RW:5 Kelurahan:Mangunharjo Kecamatan:Tugu	3	5	Mangunharjo	Tugu	
18	3374161901160006	3374160604880002	Choerudin	Mangunharjo RT:3 RW:5 Kelurahan:Mangunharjo Kecamatan:Tugu	3	5	Mangunharjo	Tugu	
19	3374161212051555	3374165308000001	Melani Rahma Asha Aulia	Mangunharjo RT:3 RW:5 Kelurahan:Mangunharjo Kecamatan:Tugu	3	5	Mangunharjo	Tugu	
20	3374161212053320	3374164707820001	Istirokah	Jl.Karanggayam RT:1 RW:5 Kelurahan:Mangunharjo Kecamatan:Tugu	1	5	Mangunharjo	Tugu	
21	3374161509200003	3374164101940001	Richayatul Munadhiroh	Mangunharjo RT:3 RW:5 Kelurahan:Mangunharjo Kecamatan:Tugu	3	5	Mangunharjo	Tugu	
22	3374162901080003	3374165611070001	Aisyah As Syahwa Rossana	Mangunharjo RT:5 RW:5 Kelurahan:Mangunharjo Kecamatan:Tugu	1	5	Mangunharjo	Tugu	
23	3374160306160002	3374165702910004	Solehah	Mangunharjo 1/5	1	5	Mangunharjo	Tugu	
24	3374162508080008	3374162011800001	M Yunus	Mangunharjo 2/5	2	5	Mangunharjo	Tugu	KOS
25		tdk ada didata	Novia Chusnul K	Mangunharjo			Mangunharjo	Tugu	

26	3374161011170001	3374164404760001	Sri Wahyuningsih	Mangunharjo Rt03 Rw 05	3	5	Mangunharjo	Tugu	
27	3374160103210004	3515134905930008	Balak Betari	Mangunharjo RT 1 RW 5	1	5	Mangunharjo	Tugu	
28	3374160103210004	3515130505200002	Azzar Aisyi	Mangunharjo RT 1 RW 5	1	5	Mangunharjo	Tugu	
29	3374161212056337	3374080608640002	Agus Setyono	Mangunharjo Rt03 Rw 05	3	5	Mangunharjo	Tugu	
30	3374161212056337	3374085609630001	Sudarmi	Mangunharjo Rt03 Rw 05	3	5	Mangunharjo	Tugu	
31	3374161212056337	3374084704960002	Rahmida Arum	Mangunharjo Rt01 Rw 05	1	5	Mangunharjo	Tugu	
32	3374161212056337	3374161402980001	Abdurahman Hakim	Mangunharjo Rt01 Rw 05	1	5	Mangunharjo	Tugu	
33	3374162706200001	3374166107930001	Resti Rahayu	Mangunharjo RT 3 RW 5	3	5	Mangunharjo	Tugu	
34	3374161909190001	3324031412840002	Erik Prasetyo	Mangunharjo 2/5	2	5	Mangunharjo	Tugu	
35	3374161909190001	3374165204910001	Sofiatun	Mangunharjo 2/5	2	5	Mangunharjo	Tugu	
36	3374161909190001	3324035911100001	Fitria Eka	Mangunharjo 3/5	3	5	Mangunharjo	Tugu	
37	3374161909190001	3324034212130001	Sania Putri	Mangunharjo 1/5	1	5	Mangunharjo	Tugu	

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2395/Un.10.6/K/KM.05.01/02/2022 16 Februari 2022  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.  
Kepala dan Staff Kelurahan Mangunharjo  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penulisan Skripsi** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul **"Politik Distributif Bantuan Sosial Sembako Di Akar Rumput Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021"** di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Salsana Desyca Dini Safitri  
NIM : 1806016030  
Semester : VII  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 20 Desember 2000  
CP/e-mail : [salsanadesy@gmail.com](mailto:salsanadesy@gmail.com)  
Nama Ayah/ Ibu : Sulasun  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Perum. Shangrila Sango rt 02/03 Randugarut,  
Tugu Kota Semarang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



A. Dekan  
Kasub bag Akademik

A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :  
Dekan FISIP UIN Walisongo

## Lampiran 6. Daftar Pertanyaan Wawancara

### A. Untuk Perangkat Kelurahan Mangunharjo Semarang

#### Daftar Pertanyaan

1. Berapa data warga kelurahan Mangunharjo yang terpapar Covid-19 tahun 2021?
2. Berapa data penerima bantuan sosial sembako di Tanggulsari RW.005 Kelurahan Mangunharjo?
3. Apa saja bantuan sosial yang diterima dari Pemkot untuk penerima?
4. Ada tidak syarat khusus yang ditetapkan pihak kelurahan Mangunharjo terlepas dari aturan pemerintah kota?
5. Menurut bapak/ibu dengan adanya program bantuan sosial apakah cukup membantu kesejahteraan masyarakat selama Covid-19?
6. Menurut bapak/ibu apakah dalam pendistribusian bansos sembako covid-19 yang telah dilakukan sudah cukup efektif? Apakah sudah merata?
7. Bagaimana mekanisme pendistribusian bantuan sosial sembako sehingga sampai pada masyarakat?
8. Adakah hambatan atau kendala yang dihadapi saat pendistribusian bansos?
9. Apakah pihak kelurahan pernah mengalami konflik saat pendistribusian? Kalau pernah bagaimana cara menyelesaikannya?
10. Bagaimana peran masing-masing perangkat kelurahan dalam pendistribusian?
11. Apa solusi dari perangkat kelurahan jika ada warga yang tidak memenuhi syarat tapi mereka sangat membutuhkan bansos tersebut?
12. Bagaimana peran kelurahan dalam mengatasi penyebaran covid-19 khususnya di Kelurahan Mangunharjo?
13. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang kasus-kasus korupsi bansos covid-19 yang saat itu sering diberitakan di televisi?

## **B. Untuk Warga Tanggulsari Penerima Bantuan Sosial Sembako Covid-19 tahun 2021**

### **Daftar Pertanyaan**

1. bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang distribusi bantuan sosial di Kelurahan Mangunharjo? Apa sudah cukup baik? apa sudah tepat sasaran?
2. bapak/ibu pernah terkena hambatan sewaktu penerimaan bansos sembako tersebut tidak? Jika iya seperti apa bentuknya?
3. bagaimana pendapat bapak/ibu terkait bansos sembako covid-19? Apakah sudah cukup membantu perekonomian yang terganggu?
4. apakah bapak/ibu sudah merasa puas dengan distribusi bansos sembako yang dilakukan oleh kelurahan dan Ketua RW?
5. apakah ada warga penerima bansos sembako yang tidak sesuai dengan kriteria awal? Kalau ada siapa saja? Pekerjaan apa? Dan apa hubungannya dngan perangkat Kelurahan atau Ketua RW?
6. apakah ada warga yang harusnya dapat dan sesuai kriteria penerima bansos covid-19 tapi tidak dapat? Kira-kira kenapa tidak dapat?
7. menurut bapak/ibu siapa yang paling berperan mempengaruhi distribusi bansos sembako disini?
8. bagaimana hubungan Ketua RW dengan warganya?
9. bagaimana peran Ketua RW dalam setiap masalah yang muncul? Apakah perannya besar dan sangat penting?
10. apa saran bapak/ibu untuk distribusi bansos kedepan?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Salsana Desyca Dini Safitri  
TTL : Semarang, 20 Desember 2000  
Alamat : Perum. Shangrila Sango rt 02/03 Randugarut,  
Semarang  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan/ Prodi : Ilmu Politik  
Email : salsanadesy@gmail.com

### **Pendidikan Formal :**

- a. SDN Tambak Aji 02 : 2007-  
2012
- b. Mts NU Nurul Huda Semarang : 2012-  
2015
- c. MA NU Nurul Huda Semarang : 2015-  
2018
- d. UIN Walisongo Semarang : 2018-  
Sekarang

### **Pendidikan Non Formal**

- a. TPQ ISIQOMAH : 2004-  
2010

### **Pengalaman Organisasi**

- a. Dewan Ambalan Nyi Ageng Manila : 2016-  
2017



- b. IPPNU MA NU Nurul Huda Semarang : 2017
- c. PMII Rayon FISIP
  - Biro Kaderisasi : 2019-2020
  - Biro Wacana PMII FISIP : 2020-2021
- d. DEMA FISIP UIN WALISONGO : 2020-2021

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 November 2022



Salsana Desyca DS